

Sahabat Keluarga



KELUARGA KUNCI ATASI *STUNTING*

BKKBN Optimistis Target
Pemutakhiran 2023 Tercapai

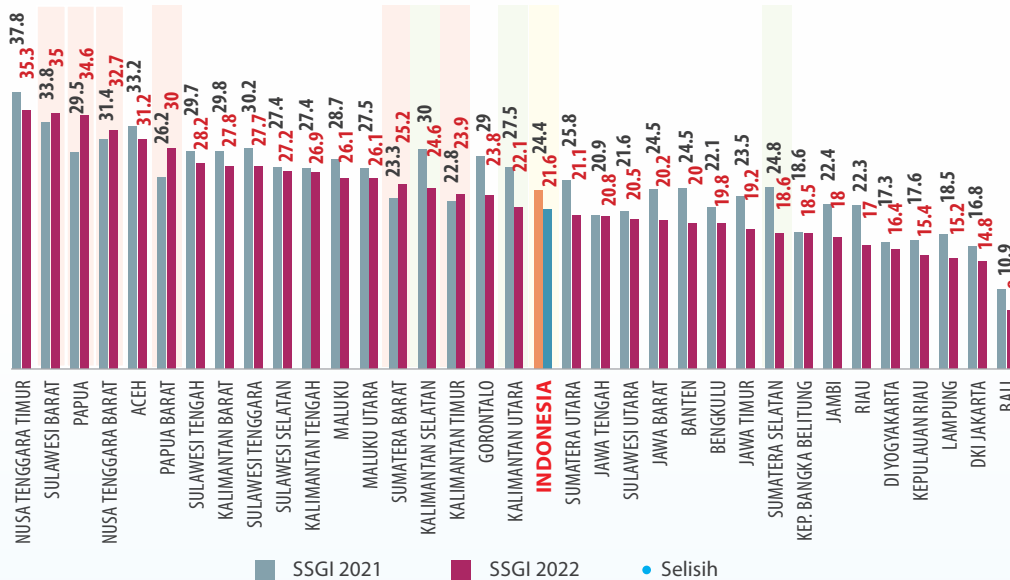
Kepala BKKBN: Kader KB dan TPK
Akar Program BKKBN



Edisi Agustus 2023

Angka *Stunting* Provinsi Berdasarkan **SSGI 2021 dan 2022**

DATA SSGI NASIONAL



- 1 Secara Nasional**

Prevalensi *Stunting* turun dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2022) atau sebesar 2,8%
- 2 Meningkatkan di 6 Provinsi**

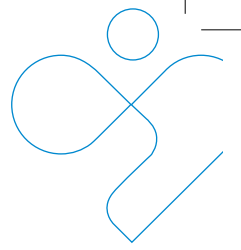
Ada 6 Provinsi yang prevalensinya meningkat, yaitu Papua (5.1%), Papua Barat (3.8%), Sumatera Barat (1.9%), NTB(1.3%), Sulawesi Barat (1.2%), dan Kalimantan Timur(1.1%)
- 3 Prevalensi Tertinggi**

NTT merupakan provinsi tertinggi prevalensi *Stunting*nya (35,3%)
- 4 Prevalensi Terendah**

Bali merupakan provinsi terendah prevalensinya (8%)
- 5 Provinsi dengan Penurunan Tertinggi**

Sumatera Selatan (6.2%), Kalimantan Selatan (5.4%), Kalimantan Utara (5.4%)





EDITORIAL

Pencegahan Lebih Efektif Turunkan *Stunting* ... 1

JENDELA

Semangat Luar Biasa Para Perempuan Inspirator dalam Mencegah *Stunting* 2



LAPORAN UTAMA

Hadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional Wapres Ma'ruf Amin: Keluarga Kunci Atasi *Stunting* 4

Wapres Kunjungi Pembangunan Perumahan Keluarga Berisiko *Stunting* 8

Mobil Unit Penerangan BKKBN Wujudkan Kehadiran Negara di Masyarakat 10

Peringatan Harganas di Papua Upaya Wujudkan Keluarga Berkualitas 12

LAPORAN KHUSUS

Lewati Tantangan Guna Menilik dan Memutakhirkan Data Keluarga di Papua 16

Hari Kependudukan Dunia 2023 Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan 18

STUNTING

Gerakan Inovasi Praktik Baik di Desa Bebas *Stunting* Bisa Cegah Kelahiran Bayi *Stunting* 22

TNI & STUNTING

Menebar Layanan di Sumenep & Masalembu BKKBN-TNI Berkolaborasi 24

Kepala BKKBN Apresiasi Progam Manunggal Air dan Babinsa Masuk Dapur 28

POTRET 30

KB & KESPRO

BKKBN Dukung RSUD Kabupaten Karawang Jadi *Center of Excellence* Pelayanan Ibu dan Anak 32

PEMBANGUNAN KELUARGA

Kepala BKKBN: Kader KB dan TPK Akar Program BKKBN 34

SOSOK

Nur Nadlifah Komitmen dalam Percepatan Penurunan *Stunting* 38

Ketut Kariyasa Sasar Desa Kantong *Stunting* 40

KIPRAH

Porseni IPeKB Ganjar Pranowo Puji Peran Penyuluh KB 42

Cegah Perkawinan Anak dan *Stunting* BKKBN Kenalkan Aplikasi Elsimil ke *South South Triangular Cooperation* 45

TEKA TEKI SILANG 47

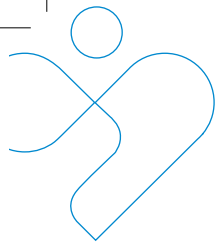
DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta Raih Apresiasi Terbaik dalam Penyerapan Dana BOKB *Stunting* 48

Sekolah Lansia di Bangka Belitung Keterlibatan Swasta dalam Bahagiakan Orang Tua 49

dr HASTO MENJAWAB 50

PERSPEKTIF 51



REDAKSI

Sahabat Keluarga



Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id
Telp. 0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Redaksi menerima tulisan terkait isu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta *Stunting*.

Kirim ke alamat/kantor redaksi atau email redaksi.

Pelindung

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Pengarah

Deputi Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd

Penanggungjawab

Plt. Direktur Komunikasi, Informasi, Edukasi
Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si

Redaktur

Ade Anwar
Muktiani Asrie Suryaningrum
Fimela Apriany
Annisa Halimatusyadiah
Bramanda Garibaldi
Ronny A.P. Situmorang

Penyunting

Kristianto
Santjojo Rahardjo
Emah Salomi Suebu
Rika Utari
Nina Tri Rahmiyanti

Desain Grafis

Antonius Angkawijaya
Subhan

Sekretariat

Teddi Hadian Ruswandi

Pembuat Artikel

Tri Setyo Rachmanto
Rizky Fauzia
Tricyntia Kobis
Siti Maryaningsih
Tresnawati
Tri Wulandari Henny Astuti
Fitri Aminatul Azizah
Risna Yulida
Dadang
Nur Octavia Dian
Aulia FD
FX Danarto
Libea Aramti
Cathyana Fafilaya

Fotografer

Muhammad Rinualdy
Vivaldi Maulana Zhafran
Samidi



bkkbnofficial



@BKKBNOfficial



@BKKBNOfficial



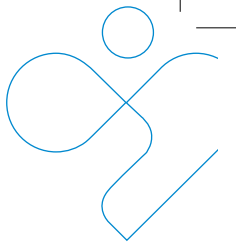
BKKBNOfficial



BKKBNOfficial



<http://www.bkkbn.go.id>



PENCEGAHAN LEBIH EFEKTIF TURUNKAN *STUNTING*

Upaya pencegahan jauh lebih efektif menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia. Karena itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan upaya pencegahan *stunting* dari hulu, yakni melalui *skrining* calon ibu agar bayi yang dilahirkan tidak *stunting*.

“Kalau kita mengejar anak yang *stunting* menjadi tidak *stunting*, keberhasilannya hanya 20 persen. Namun dengan mencegah lahirnya bayi *stunting* baru keberhasilannya lebih dari 80 persen,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K).

Kepala BKKBN mencontohkan kabupaten dengan jumlah penduduk 100 ribu jiwa, paling banyak akan ada ibu hamil sekitar dua ribu orang. Dalam sehari, rata-rata akan lahir sekitar enam bayi. Kemudian apabila di rata-rata, yang akan menikah jumlahnya separuh yakni tiga calon pengantin.

Mengutip pernyataan dan contoh yang dikemukakan Kepala BKKBN, sebagai pimpinan daerah tentu saja angka-angka yang bergerak di persoalan *stunting* harus dicermati. Termasuk mengetahui kondisi bayi yang lahir hari itu. Berapa berat dan panjang badannya. Dari mereka yang menikah, harus juga diketahui apakah anemia atau tidak. Peralnya, mereka yang anemia berisiko melahirkan bayi *stunting*. Mereka harus segera didampingi Tim Pendamping Keluarga (TPK).

BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait terus berupaya melakukan pembinaan, memotivasi, dan menggerakkan TPK agar konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan upaya-upaya penurunan *stunting* sesuai peranannya masing-masing. Termasuk meningkatkan kapasitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di seluruh

daerah untuk mempercepat penurunan *stunting* melalui kegiatan inovatif di masing-masing daerah.

Salah satu keseriusan ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Daru. Secara terbuka Gubernur mengungkapkan dirinya berusaha memahami dan belajar banyak tentang *stunting* dan potensi yang bisa digunakan untuk mencegah *stunting*. Seperti penggunaan tablet penambah darah di mana Dinas Pendidikan bisa mengajak anak sekolah remaja putri untuk minum tablet penambah darah.

Contoh yang setidaknya patut disimak dari Provinsi Sumatera Selatan adalah penguatan data dari kecamatan hingga Kabupaten-Kota. Dari situ bisa diketahui intervensi apa yang bisa dilakukan pemerintah.

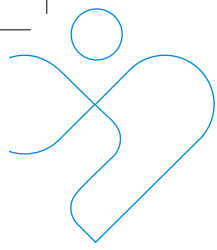
Membangun kemitraan dengan berbagai sektor, merupakan bagian yang juga dijalankan Pemrov Sumatera Selatan. Selain juga menghidupkan kembali Posyandu sebagai garda terdepan serta memanfaatkan tenaga Kesehatan yang berada di desa-desa.

Demikian halnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang mendapat penghargaan

Satyalencana Wira Karya atas komitmennya terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan percepatan penurunan *stunting*. Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bengkulu merupakan sederet dari banyak Gubernur yang komitmen atas program-program tersebut.

Agar tercapai target 14 persen prevalensi *stunting* pada 2024 sesuai Peraturan Presiden No. 72 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, apa yang dilakukan para gubernur itu merupakan beberapa penggal kegiatan program yang harus digerakkan di lini terdepan di setiap provinsi. Pada akhirnya, pencegahan akan lebih efektif dalam penurunan *stunting*. *





Semangat Luar Biasa Para Perempuan Inspirator dalam Mencegah *Stunting*



Mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia Prof. (HC) Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan dari Tribun Network sebagai Perempuan Inspirator dan Penggerak Cegah *Stunting*.

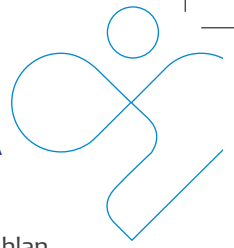
■ Penulis: Rizky Fauzia

MANTAN Presiden ke-5 Republik Indonesia Prof. (HC) Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Dr. Emi Nurjismi, M.Kes, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Hetty Andika Perkasa mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Inspirator dan Penggerak Cegah *Stunting* oleh Tribun Network.

Acara tersebut berlangsung di studio Kompas Gramedia, Senin sore (17/07/2023), dihadiri Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) yang sekaligus memberikan penghargaan tersebut kepada para penerima.

Dr. Hasto Wardoyo mengatakan bahwa para penerima penghargaan telah secara luar biasa berkontribusi dalam menurunkan stunting di Indonesia. “Hari ini adalah penghargaan untuk kaum perempuan yang sungguh luar biasa. Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri telah memberikan contoh kepada kita, bahwa sebelum ada Perpres stunting beliau telah mengatakan pada kita bahwa jangan makanannya mie mie saja. Itu menjadi bahasa yang sangat simple dan menjadi bahasa sehari-hari yang dipahami oleh kita semua.”

“Terus disambung Pak Menkes yang mengingatkan kita, sudahlah pokoknya telur sehari 1 atau 2 sudah



cukup. Nah, *alhamdulillah* hari ini baik peringatan dari Ibu Megawati dan juga Pak Menkes, dua-duanya kita jadikan jargon. Kita kemudian bergerak dan bisa menurunkan stunting. Kami mengucapkan terimakasih,” ucap dr. Hasto.

Selain itu, kata Hasto, Megawati bersama Walikota Semarang dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si beserta jajaran telah membuat buku resep MPASI sederhana yang kaya akan gizi dengan pangan lokal yang mudah didapat.

Menurut dr. Hasto, Bu Mega telah membuatkan resep makanan yang didukung Bu Ita, Bu Bintang dan semua jajarannya. Resep makanan ini sangat sederhana, makanannya dari bahan-bahan lokal dan ada di seluruh Indonesia.

“Peran ibu-ibu ini sungguh luar biasa dimulai dari Ibu Megawati, kemudian ibu-ibu yang lainnya tergerak semuanya. Bergerak bersama-sama. Dan tentu pangan nasional menjadi harga hidup bangsa. Artinya, Bung Karno pernah mengatakan hidup mati kita itu tergantung pangan nasional,” ujar dr. Hasto.

Oleh karena itu, lanjut dr. Hasto, bangsa ini sangat merawat produk lokal, panganan lokal yang bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam percepatan penurunan *stunting*.

Sementara itu, dalam *keynote speech*-nya Megawati menyemangati kaum perempuan untuk memberikan makanan bergizi terbaik untuk anak-anaknya agar tidak *stunting*. “Materi hari ini adalah *stunting*. Saya mau ucapkan terima kasih sekali kepada Kompas Group. Umur saya 76, masih sehat. Kenapa? Karena ibu saya memelihara saya dengan baik. Karena ibu saya itu *first lady* ibu negara pertama RI,” ungkapnya.

Ia menuturkan walaupun seorang *first lady* di Republik Indonesia, ibunya Megawati selalu merawat anak-anaknya dengan memasak langsung makanan yang bergizi. Megawati juga menyinggung tentang pentingnya menurunkan *stunting* untuk memanfaatkan bonus demografi yang kini sedang dialami Indonesia.

“*Stunting* ini sangat perlu untuk di introdusir bagi seluruh rakyat Indonesia terutama karena yang hamil itu perempuan. Bayangkan Pak Jokowi bilang 2023 masuk bonus demografi RI. Bonus itu beliau bilang tidak selalu akan terjadi tiap tahun,” ujar Megawati.

Chief Executive Officer Tribun News Network, Dahlan Dahi, dalam sambutannya pada acara tersebut sangat mengapresiasi para penerima penghargaan yang dengan semangatnya dan pengaruhnya bisa menggerakkan orang lain untuk ikut mencegah *stunting*.

“Kami mendapatkan informasi di lapangan mengenai tokoh-tokoh inspirasi para ibu untuk mencegah *stunting*. Tokoh tersebut adalah ibu Megawati Soekarno Putri. Seorang ibu dengan pengaruh yang begitu besar memberikan kepada masalah strategis bangsa ini yaitu *stunting*. Menginspirasi para pejabat, para pengusaha dan kader partai, para aktivis untuk bersama-sama mencegah *stunting*.”

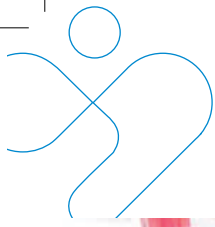
Pada saat ini Tribun juga menyelenggarakan *social movement* dengan membagikan telur. Tribun telah mengajak para donatur untuk menjadi kakak asuh *stunting* dengan target 1.000 kakak asuh. Hingga kini sudah tercatat 790 kakak asuh yang membantu 800 anak berisiko *stunting* di 34 provinsi di Indonesia, kata Dahlan.

Penghargaan “Inspirator dan Penggerak Cegah *Stunting*” juga dihadiri Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si, Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU; Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D; perwakilan TNI dan Polri; CEO Kompas Gramedia (KG) Lilik Oetama beserta jajaran petinggi Kompas Gramedia.

Editor: Santjojo Rahardjo



Megawati Soekarnoputri.



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin didampingi Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan sejumlah pejabat lainnya saat acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 di halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumsel.

Hadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional

Wapres Ma'ruf Amin: Keluarga Kunci Atasi *Stunting*

■ Penulis: Tri Setyo Rachmanto

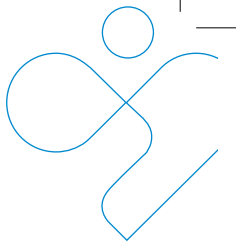
WAKIL PRESIDEN (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 yang digelar di halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (06/07/2023).

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan keluarga merupakan kunci dalam membentuk generasi masa depan dan mengatasi *stunting*.

"Saat ini, prevalensi *stunting* di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai adalah 14 persen pada 2024. Setiap tahunnya kita harus bisa

menurunkan 3,8 persen sehingga nantinya target bisa tercapai. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga," kata Ma'ruf Amin.

Karena itu Wapres Ma'ruf Amin mengakal seluruh keluarga Indonesia agar memperkokoh peranannya dalam mencetak generasi penerus yang bebas *stunting*, fisiknya, mentalnya maupun kehidupannya. Karena menurutnya kelak mereka akan menjadi generasi yang



Keluarga harus menjadi aktor kunci dalam mengatasi *stunting*. Memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan

“Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital,” kata Wapres.

Selain itu juga agar kembali memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin

mampu mengguncang dunia, seperti yang diucapkan Presiden Soekarno.

“Keluarga harus menjadi aktor kunci dalam mengatasi *stunting*. Memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan,” ujar Wapres.

Masalah *stunting* menurut Wapres bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan.

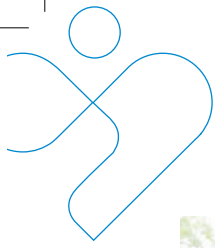
Lebih lanjut Ma'ruf Amin mengatakan saat ini juga pernikahan anak masih relatif tinggi.

“Untuk itu, pernikahan anak harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak *stunting*. Bagi keluarga yang memiliki anak remaja, agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat,” tegas Ma'ruf Amin.

Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan harapannya, agar keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal.



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) saat memberikan sambutan.



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin didampingi Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan sejumlah pejabat lainnya berbincang dengan Duta GenRe.

Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) mengungkapkan kondisi kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program Keluarga Berencana selama ini sudah sukses mengantarkan kepada TFR (*Total Fertility Rate*) Nasional di angka 2,14.

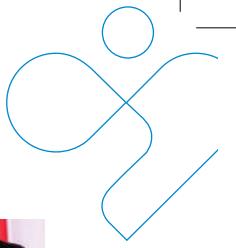
“Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk,” kata Hasto.

Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035

Terkait *stunting* Kepala BKKBN menambahkan, “Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi *stunting* yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun masih berada di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat *stunting*.”



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin disambut dengan adat Sumatera Selatan.



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin didampingi Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) bercengkrama dengan anak-anak.

Menurutnya BKKBN melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN Pasti), telah menterjemahkan lima pilar Stranas dan disempurnakan dengan; Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, Pendampingan keluarga berisiko *stunting*, Pendampingan calon pengantin, Surveilans keluarga dan Audit Kasus *Stunting*.

Satyalencana Wira Karya

Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional itu juga Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan tanda jasa Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya kepada para kepala daerah.

Satyalencana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

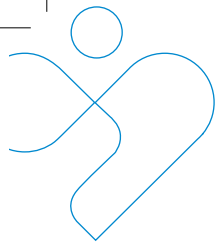
Sedangkan Satyalencana Wira Karya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lainnya.

Hadir dalam Puncak peringatan Harganas ke-30 tahun 2023, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Riyco Amehza Daniel, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Bupati Banyuwasin Askolani, serta walikota dan bupati seluruh Indonesia.

Editor: Kristianto



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada sejumlah tokoh masyarakat.



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin didampingi Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) melihat poster pembangunan perumahan keluarga berisiko stunting.

Wapres Kunjungi Pembangunan Perumahan Keluarga Berisiko *Stunting*

■ Penulis: Rizky Fauzia

WAKIL PRESIDEN Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H, M.M dan Bupati Banyuasin Askolani, mengunjungi pembangunan perumahan Kampung KB di Desa Rimba Balai, Kecamatan Banyuasin III.

Kunjungan itu dilakukan usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tahun 2023 yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Kamis (06/07/2023).

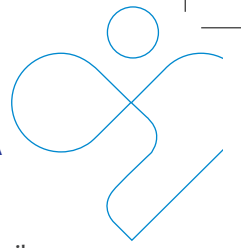
Pembangunan perumahan ini menyasar keluarga berisiko *stunting* yang telah didata dalam Pendataan Keluarga.

Dalam pernyataannya Wakil Presiden menyatakan bahwa dalam menangani *stunting* dilakukan intervensi sensitif maupun spesifik. Intervensi sensitif, yakni

intervensi pendukung untuk percepatan penurunan *stunting*, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi seperti yang dilakukan pada pembangunan rumah di Kampung KB Desa Rimba Balai ini.

“Pertama tentu strategi kita untuk melakukan intervensi baik sensitif maupun spesifik, dan kemudian melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak. Ya pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kemudian juga swasta untuk ikut bergerak kemudian juga perorangan-perorangan yang disebut orang tua asuh dan menggerakkan semua unsur termasuk generasi muda, ya remaja,” jelas Wapres.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) yang juga ikut mendampingi Wakil Presiden RI, menjelaskan strategi BKKBN dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.



“Terkait strategi sesuai arahan Pak Wapres kami memang menjalankan lima pilar dari Stranas. Pilar pertama kita membangun komitmen seperti hari ini seluruh kepala daerah. Kemudian yang kedua kita melakukan masif sosialisasi melalui media juga. Pilar ketiga kita diarahkan untuk konvergen mengerucut kepada program percepatan penurunan *stunting* dari semua kementerian/lembaga yang terkait. Pilar keempat itu kita diarahkan untuk penyediaan pangan yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah pendataan dan evaluasi. Itu arahan pak wapres melalui perpres juga kita tindak lanjuti di lapangan,” kata Hasto.

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H, M.M menjelaskan bahwa keberhasilan Sumatera Selatan menurunkan angka *stunting* sebesar 6.2 persen merupakan upaya berbagai pihak khususnya kesadaran masyarakat. Ia pun menjabarkan program yang ia canangkan dalam keberhasilannya menurunkan angka *stunting* tersebut.

“Ini perangkat yang kita gunakan Posyandu pertama kali. Jadi aktivasi Posyandu kita buat masif untuk mendiagnosa awal. Jadi deteksi dini *stunting* itu tidak bisa memprogramkan sebelum dapat data konkret itu. Data

awal 24.8% telah kita terapi artinya calon pengantin, ibu hamil, atas anjuran BKKBN juga Pak Hasto yang begitu aktif berkomunikasi sedikit demi sedikit turun. Bahkan penurunan yang luar biasa yakni 6.2%,” ujar dia.

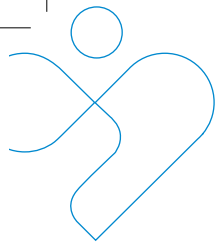
Pembangunan perumahan Kampung KB Desa Rima Balai diperuntukkan bagi para keluarga dengan beberapa kriteria selain sebagai keluarga yang berisiko *stunting*, salah satunya bagi keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Data di Banyuasin sendiri terdapat sebanyak 30.284 unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menurut data DTKS tahun 2020. Hingga tahun 2022 sebanyak 10.851 unit telah dilakukan penanganan RLTH. Pembiayaan rumah Kampung KB Desa Rimba Balai oleh CSR beberapa perusahaan seperti PT. Bank Sumsel Babel, PT. SMS, PT. KAM, PT. Citra Lestari Sawit, PT. Pulau Subur, Rei Sumsel, Rei Banyuasin, PT. Swadaya Indo, PT. Pulau Subur, PT. Banyuasin Sawit Lestari, PT. Tunas Jaya Negeriku, PT. DSAP, PT. PUSRI, PT. Pertamina RU III, dan Bupati Banyuasin. Rencana jumlah rumah yang dibangun adalah sebanyak 100 rumah, yang kini sudah dibangun sejumlah 30 rumah.

Editor: Kristianto



Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin mendapatkan penjelasan terkait pembangunan perumahan keluarga berisiko *stunting*.



Mobil Unit Penerangan BKKBN Wujudkan Kehadiran Negara di Masyarakat

■ Penulis: Tri Setyo Rachmanto

SETELAH menempuh perjalanan sekitar 532 kilometer dari Jakarta hingga Palembang. Empat puluh Mobil Unit Penerangan (Mupen) yang mengikuti kegiatan bertajuk Temu Mobil Unit Penerangan se-Jawa-Sumatera (Temu Mupen Jawa) tiba di Plaza Barat Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Rabu (05/07/2023).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) dalam sambutannya mengungkapkan, “Mupen BKKBN yang berkonvoi dari Jakarta hingga Palembang bukan hanya menjadi ajang perjalanan dan penyebaran informasi tentang program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga

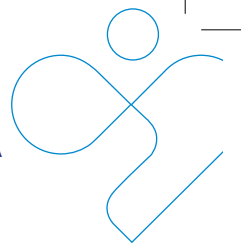
Berencana) dan *stunting*. Namun diharapkan mampu memberikan dampak baik kepada masyarakat di lokasi yang disinggahi.

Menurutnya mupen ini memiliki nilai filosofis, bahwa kita harus mampu menembus batas-batas daerah terpencil untuk bisa hadir dan memberikan layanan pada masyarakat. Kehadiran pemerintah atau negara dalam keluarga yang ada di daerah-daerah terpencil itu akan memberikan suasana hati yang berbeda.

“Saya selalu ingat pesan Presiden Joko Widodo, Nawacita itu semangatnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Melalui kegiatan ini kita harus mampu memberikan layanan yang utama di daerah-daerah yang



Acara Temu Mupen Jawa-Sumatera dalam rangka Harganas ke-30.



Mobil pelayanan KB.

susah di jangkau atau daerah tertinggal,” ungkap Dokter Hasto.

Temu Mupen Jawa yang juga merupakan salah satu kegiatan memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) dalam perjalanannya melakukan beberapa kegiatan di Provinsi Banten dan Lampung, diantaranya : pelayanan KB (Implant); pelayanan papsmear; pemberian vitamin pada remaja dan cek Kesehatan; donor darah.

Kemudian juga menyerahkan bantuan kepada keluarga berisiko *stunting* dan Ibu Hamil; penyerahan Bantuan dari Baznas; pemberian Bantuan Telur; penyuluhan kepada remaja GenRe dan penyerahan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Lebih lanjut menurut Kepala BKKBN, “Mobil Unit Penerangan ini pada masanya sangat diperlukan sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi terkait program Keluarga Berencana. Mupen mendatangi daerah melakukan pemutaran film sosialisasi program dan pelayanan pada masyarakat tentunya karena perkembangan teknologi hal itu kini sudah jarang dilakukan.

Mupen BKKBN sangat strategis fungsinya untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak bisa dilalui oleh mobil biasa, terutama untuk percepatan penurunan *stunting*. “Saya berharap kegiatan Mupen ini menjadi daya ungkit dan bisa diaktifkan kembali dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kearifan lokal. Sehingga juga mampu mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.”

Stunting menurut Hasto Wardoyo memang menjadi

persoalan yang harus segera kita selesaikan tetapi dibalik itu masih ada persoalan lain yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki mental, karakter dan cara berpikir yang baik.

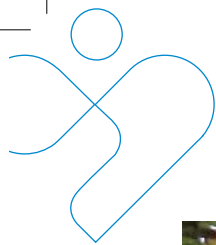
TNI AD-BKKBN Teken Kerja Sama

Dalam kegiatan Temu Jawa Mupen juga ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara BKKBN dengan TNI Angkatan Darat (AD), dilakukan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari, M.A yang mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), dan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. sebagai perwakilan BKKBN.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Hamim Tohari, M.A menyampaikan bahwa, penandatanganan PKS ini menjadi bukti komitmen TNI AD untuk bekerja sama dengan BKKBN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Khususnya dalam penanganan *stunting*, yang selama ini menjadi masalah nasional.

“Masalah *stunting* apabila tidak ditangani, maka dampaknya akan panjang. Jadi, bagi kami (TNI AD), penanganan *stunting* adalah investasi masa depan untuk jangka panjang. Karena yang kita tanam hari ini, dampaknya tidak langsung kita rasakan dalam satu atau dua tahun, tetapi dalam jangka panjang. Kita akan bisa menghasilkan generasi penerus dengan SDM yang berkualitas. Termasuk dalam perekrutan prajurit TNI nantinya, bisa mendapatkan SDM yang berkualitas,” kata Hamim.

Editor: Kristianto



Peringatan Hari Keluarga Nasional di Papua.

Peringatan Harganas di Papua

Upaya Wujudkan Keluarga Berkualitas

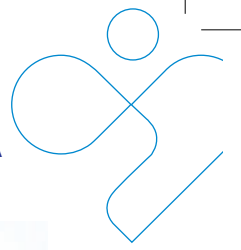
■ Penulis: Tricintya C. A. Kobis

SEDERHANA namun semangat dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Provinsi Papua terus menyala. Semangat dalam menurunkan *stunting* dan mewujudkan keluarga berkualitas di Papua untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut merupakan spirit dalam Peringatan Harganas tingkat Provinsi Papua, yang dilaksanakan di halaman kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua,

Kamis (27/07/23).

Perayaan tersebut dihadiri Pejabat Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Pejabat Walikota yang diwakili Asisten I Setda Kota Jayapura, Staf Ahli Kementerian Sosial RI, Perwakilan Kodam XVII Cenderawasih, Perwakilan Polda Papua, dan tamu undangan.



Acara diawali dengan kegiatan senam bersama, dilanjutkan dengan makan pangan lokal bersama dan dialog bertemakan “Pemanfaatan Pangan Lokal dalam Pencegahan Stunting”.

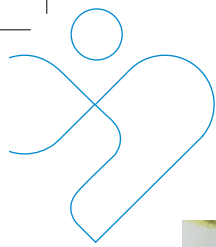
Dialog terlaksana dengan menghadirkan narasumber Ahli Gizi dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, STP., M.Si. Diskusi tersebut menjadi jembatan antara permasalahan dan keingintahuan sejumlah masyarakat dari kader kelompok kegiatan, anak remaja, ibu rumah tangga dengan para narasumber ahli gizi maupun pemangku kebijakan di Provinsi Papua.



Pelepasan balon udara pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Papua.

Pemberian bingkisan kepada masyarakat pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Papua.





LAPORAN UTAMA



Asisten I Setda Kota Jayapura
Evert Meraudje



Kepala Perwakilan BKKBN Papua,
Drs. Nerius Auparay, M.Si



Nius Wenda, S.Pd., M.Si



Budi Kristanto, STP, M.Si

Peringatan Harganas ke 30 yang mengusung tema “Menuju Keluarga Bebas *Stunting* Untuk Indonesia Maju” menjadi kunci kolaborasi yang terus dilakukan oleh BKKBN Papua.

Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa ada dua amanah yang diberikan negara kepada BKKBN, yaitu menjaga penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga berkualitas.

“Tantangan kita tidak lagi berfokus pada pengendalian kuantitas atau jumlah penduduk, mencegah ledakan penduduk dan menekan jumlah kelahiran. Kami lebih menekankan pada peningkatan kualitas penduduk yang akan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat,” jelas Nerius.

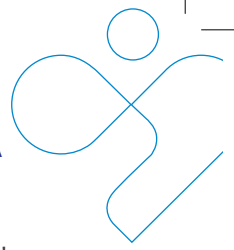
Nerius mengatakan dengan terwujudnya keluarga dan SDM berkualitas, maka akan terbebas dari *stunting* dan tentunya akan memajukan Indonesia.

Nerius juga mengingatkan bahwa berdasarkan data SSGI Tahun 2022, prevalensi *stunting* Indonesia berada pada angka 21,6% dan di Provinsi Papua berada pada angka 34.6%. Oleh karena itu, perlu kolaborasi nyata sehingga target nasional 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.

Beberapa agenda penting juga turut dilaksanakan seperti komitmen dari Kementerian Sosial yang diwakili oleh Staf Ahli Kementerian Sosial (Kemensos) RI Bidang Rehabilitasi Sosial, Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM, dalam program Bedah Rumah untuk 3 unit rumah di Skouw Mabo, Muara Tami, sebagai salah satu cara



Stand dapur sehat atasi *stunting*.



dalam pencegahan *stunting* untuk tersedianya rumah layak huni.

“Kami (Kementerian Sosial) dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua akan melakukan bedah rumah di Kota Jayapura dengan fokus lokus Distrik Muara Tami, ini juga untuk membantu masyarakat atau keluarga untuk menurunkan angka *stunting* dengan rumah yang bersih, sehat dan rumah dengan lingkungan yang sehat pula maka kita bersama-sama mendukung program nasional untuk menurunkan angka *stunting* di tanah Papua,” jelas Benhur.

mengonsumsi makanan bergizi, saya tegaskan bahwa makanan bergizi bukanlah makanan mahal, ada banyak pangan lokal yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber makanan bergizi bagi keluarga,” kata Nius.

Asisten I Setda Kota Jayapura Evert Meraudje dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jayapura melihat bahwa masalah *stunting* ini adalah sebuah keadaan yang harus dilawan bersama agar dapat menghasilkan kualitas SDM yang handal.

“Untuk melawan *stunting* Pemerintah Kota Jayapura mengedepankan kolaborasi, karena Pemerintah Kota



Duta GenRe Papua.

Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS)

Agenda selanjutnya yaitu penyerahan bantuan berupa bahan makanan dari Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) BKKBN Papua kepada keluarga/ anak berisiko *stunting* sejumlah 39 anak dari 5 distrik di Kota Jayapura. Komitmen BAAS BKKBN Papua dalam pemberian bantuan ini akan berlangsung secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan.

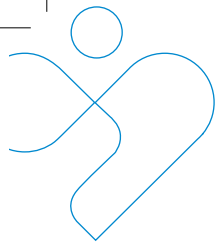
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Nius Wenda, S.Pd, M.Si, melihat gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* ini sebagai bentuk kepedulian dan gotong-royong kita dalam pencegahan *stunting*.

“Saya menghimbau seluruh pimpinan lembaga dan organisasi untuk dapat bergabung berperan sebagai Bapak dan Ibu Asuh Anak *Stunting*. Selain itu mari kita giatkan keluarga-keluarga kita untuk gemar

Jayapura tidak bisa sendiri dalam memerangi *stunting* ini, Pemerintah Kota Jayapura beserta seluruh jajaran *Stakeholder* juga pihak swasta akan bersatu padu untuk upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Jayapura,” jelas Evert Meraudje. Pada kesempatan tersebut dirinya juga mengapresiasi Kementerian Sosial yang telah membantu memfasilitasi kegiatan bedah rumah di wilayah Kota Jayapura Distrik Muara Tami.

Adapun agenda lainnya pada acara perayaan Harganas tingkat Provinsi Papua tersebut adalah penandatanganan MoU BKKBN dengan Baznas Papua, penandatanganan komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016, Deklarasi Komitmen Generasi Berencana oleh GenRe Papua, Deklarasi Komitmen Pencegahan *Stunting*, dan tersedianya pameran program BKKBN serta produk usaha dari UMKM dan UPPKA.

Editor: Kristianto



Lewati Tantangan Guna Menilik dan Memutakhirkan Data Keluarga di Papua

■ Penulis: Siti Maryaningsih

LETAK geografis yang sulit serta jarak antar kampung yang jauh dan sering ditempuh dengan berjalan kaki tak menyurutkan ribuan kader pendata untuk menemui keluarga-keluarga di Papua.

Hal itu dilakukan sekaitan dengan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang tengah menggelar Pemutakhiran data keluarga hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) secara serentak di seluruh Indonesia pada 1-31 Juli 2023.

“Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam memutakhirkan data keluarga pada 2023 di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Para kader pendata, dalam waktu satu bulan harus secara cepat menemui keluarga keluarga serta mendata untuk memutakhirkannya,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Neries Auparah, M.Si, Jumat (28/07/2023).

Kepulauan Papua saat ini telah dimekarkan menjadi enam provinsi yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sendiri menangani empat provinsi yang merupakan daerah otonomi baru meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.

Dua provinsi yang lain, yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023 dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Neries mengatakan setidaknya ada 10 kendala yang dihadapi para kader pendata. Kendala pertama, dalam hal besarnya biaya untuk sampai di lokasi pendataan dan

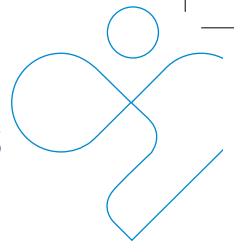


Petugas pendataan keluarga di Papua.

pemutakhiran keluarga.

Menurut Neries, kontur wilayah Papua yang di dominasi oleh Pegunungan dan hutan serta sungai dan laut, menjadi kendala serius dalam mewujudkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga 2023.

Akses jalan darat yang menghubungkan antara kabupaten satu dengan lainnya belum terhubung secara baik. Beberapa kabupaten yang belum bisa diakses sama sekali memakai jalan darat ataupun laut (secara regular)



antara lain, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Memberamo Raya.

“Contohnya, Kabupaten Yahukimo yang Ibu Kota Kabupatennya di Dekai. Untuk menuju ke Distrik Silimo, Kampung Silimo, dari Ibu Kota kabupaten berbiaya Rp35 juta untuk pulang dan pergi. Lalu dari Distrik Dekai ke Distrik Anggruk Kampung Yahulik Ikma, ongkosnya Rp70 juta pulang pergi. Demikian juga dari Distrik Dekai ke Distrik Endokmen dan Distrik Puldama, biayanya Rp90 juta untuk pergi dan pulang,” kata Nerus.

Menurut Nerus, besarnya ongkos itu karena harus menggunakan dan menyewa pesawat terbang.



Petugas pendataan mencatat informasi dari satu keluarga.

Nerus kembali mencontohkan, untuk pemutakhiran di Kabupaten Waropen, di mana Ibukota kabupaten terletak di Botawa.

“Untuk sampai ke Distrik Kirihi dari Ibu Kota Kabupaten, hanya bisa dijangkau dengan penerbangan menuju Kabupaten Nabire kemudian lanjut dengan pesawat *charter* yang berpenumpang 8 sampai 10 orang, atau menyewa helikopter dengan estimasi biaya untuk pulang pergi Rp300 juta,” ujar Nerus.

Penuhi Komitmen

Faktor keamanan, merupakan faktor kedua dalam hal kendala. Namun hal ini, terkadang juga menjadi kendala faktor pertama. Terbatasnya akses internet dan besarnya nilai honor dalam satu formulir pemutakhiran merupakan kendala ketiga dan keempat.

“Masyarakat di beberapa wilayah terisolir masih belum memiliki Identitas pribadi, baik itu KTP maupun Kartu Keluarga. Kondisi tersebut masih banyak dijumpai di beberapa Kampung yang ada di Distrik di Kabupaten Pegunungan. Hal ini menjadi kendala dalam hal status terkonfirmasi di Aplikasi penginputan,” kata Nerus.

Nerus juga menyebutkan daerah yang menggunakan metode berbasis *smartphone*, justru kader pendatannya tidak memiliki ponsel yang mumpuni sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

“Bahasa penduduk asli yang tersebar di kabupaten sangat beragam sehingga menyulitkan kader pendata dalam mewawancarai keluarga dan anggota keluarganya. Di kabupaten bisa terdapat perbedaan Bahasa Asli antara kampung yang satu dengan kampung yang satu walaupun jaraknya dekat. Jalan keluar dengan melibatkan pemuda atau orang kampung asli tetapi konsekuensi dari hal tersebut, kader pendata yang direkrut tidak memiliki kemampuan dalam hal baca tulis,” jelas Nerus.

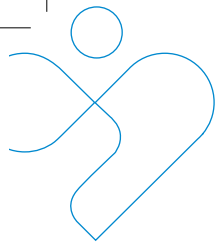
Letak rumah masyarakat yang berada di dalam hutan sehingga membutuhkan ekstra waktu tempuh perjalanan dan nyali untuk masuk ke sana,’ tambah Nerus.

Kendati menghadapi banyak kendala, Nerus mengatakan BKKBN Perwakilan Provinsi Papua dan ribuan kader pendatannya terus memegang komitmen dan semangat dalam memutakhirkan dan menemui keluarga-keluarga di Papua. Pemutakhiran Data Keluarga di empat Provinsi di Papua sudah dimulai per tanggal 1 Juli 2023. Sebelumnya dilakukan Orientasi di Tingkat Provinsi yang diikuti oleh Manajer Data, Supervisor dan Kader Pendata di 29 Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023 di Provinsi Papua melibatkan 3.786 orang yang terdiri dari Manajer Pengelola sebanyak 197 orang, Manajer Data sebanyak 197 orang, Supervisor sebanyak 722 orang, dan Kader Pendata sebanyak 2.670 orang.

Mereka harus menemui keluarga-keluarga di kampung-kampung di empat provinsi tersebut meliputi Provinsi Papua ada 150 kampung, Provinsi Papua Tengah ada 263 kampung, Provinsi Papua Selatan ada 48 kampung, dan Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 262 kampung atau desa.

Editor: Kristianto



Hari Kependudukan Dunia 2023

Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) menegaskan bahwa masyarakat global harus memajukan kesetaraan gender untuk menciptakan dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan dengan kemungkinan tak terbatas.

“Masyarakat menjadi lebih kuat dan lebih sehat ketika perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk memilih bagaimana dan kapan mereka ingin membangun keluarga yang mereka inginkan,” ujar dr. Hasto Wardoyo, Selasa (11/7/2023), di Jakarta, menyikapi peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) yang jatuh pada 11 Juli 2023.

Mengambil tema “Kekuatan Kesetaraan Gender: Mengangkat Suara Perempuan dan Anak Perempuan untuk Membuka Peluang-peluang Tanpa Batas di Dunia”, peringatan HKD 2023 lebih menyorot pada kreativitas, kecerdasan, sumber daya, dan kekuatan dari setengah populasi planet ini, yaitu perempuan. Memberdayakan perempuan sangat penting untuk mengatasi tantangan demografis dan lainnya yang mengancam masa depan umat manusia. Termasuk perubahan iklim dan konflik.

“Perempuan memainkan peran yang kuat dalam mendorong kesepakatan bersama dan membangun perdamaian di semua tingkatan.” Demikian pernyataan UNFPA (Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menulis bahwa ketidaksetaraan gender membuat banyak perempuan dan anak perempuan tidak bisa bersekolah, atau mendapatkan pekerjaan dan posisi kepemimpinan. Hanya enam negara di dunia yang jumlah anggota parlemennya setara antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi ini membatasi hak pilihan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan tentang kesehatan dan kehidupan reproduksi mereka. Hal ini

seringkali membuat mereka tidak bisa mencapai rencana reproduksi dan kesuburan yang mereka inginkan.

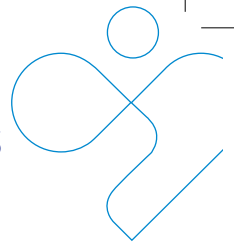
Ketidaksetaraan gender juga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan, praktik-praktik berbahaya dan kematian ibu yang sesungguhnya dapat dicegah.

Fakta yang diumumkan PBB menunjukkan lebih dari 40 persen perempuan di seluruh dunia tidak dapat mengambil keputusan tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi. Hanya satu dari empat perempuan di negara berpenghasilan rendah dan menengah bisa mewujudkan kesuburan yang mereka inginkan.

Fakta lain, secara global diketahui seorang perempuan meninggal setiap dua menit karena hamil atau melahirkan. Dan dalam situasi konflik,



Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K).



jumlah kematian dua kali lebih tinggi. Di Indonesia, seorang ibu meninggal ‘hampir’ setiap jam akibat komplikasi kehamilan dan persalinan (*Long Form Sensus Penduduk 2020*).

Potret miris lainnya, sepertiga perempuan pernah mengalami kekerasan pasangan intim, kekerasan seksual non-pasangan, atau keduanya. Di Indonesia, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan oleh pasangan atau bukan pasangannya seumur hidup (*Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia/SPHPN 2021*).

Demikian pula, sebanyak 9,23 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun (*Survei*

impian dan potensi mereka.

Terlalu sering, hambatan dan tantangan ekonomi gender terhadap hak dan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, termasuk kurangnya akses kontrasepsi, telah menyulitkan perempuan untuk menciptakan keluarga yang mereka inginkan – sehingga melanggar otonomi tubuh mereka yang mengancam masa depan global.

Pemerintah, kata dr. Hasto, harus membentengi hak perempuan dan anak perempuan serta kemampuan mereka untuk membuat pilihan berdasarkan undang-undang dan kebijakan, demi memastikan populasi global yang lebih inklusif dan tangguh.

Memberdayakan perempuan dan anak perempuan untuk menggunakan hak-hak mereka dan membuat keputusan, terutama mengenai otonomi tubuh mereka, dipastikan PBB akan berdampak langsung dalam membangun dunia yang lebih baik. Akan lebih banyak orang dapat hidup bebas dari kekerasan dan mencapai potensi optimal mereka.

Menurut Bank Dunia, menutup kesenjangan gender dalam pekerjaan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita hingga rata-rata 20 persen di masa depan. Perempuan dan anak perempuan merupakan 49,7 persen dari populasi global. Di Indonesia, 50,48% penduduk adalah perempuan dan anak perempuan (*Dukcapil Kemendagri 2022*).

Memperingati HKD 2023, UNFPA Indonesia dan BKKBN akan memperingatinya melalui berbagai kegiatan. Antara lain, kunjungan ke Kampung KB Delima di Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Indramayu, Jawa Barat, dan dialog dengan perempuan dan anak perempuan setempat.

Adapun tujuan kegiatan memperingati HKD 2023 adalah mempromosikan kesetaraan gender dalam memastikan hak dan pilihan bagi perempuan dan anak perempuan, memperkuat suara perempuan dan anak perempuan tentang hak dan pilihan mereka.

Selain itu, mendorong akses dan peluang yang lebih setara bagi perempuan dan anak perempuan untuk memperkuat hak, pilihan dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang kesehatan dan kehidupan seksual dan reproduksi mereka. Dan meningkatkan kesadaran publik tentang ketidaksetaraan gender dan dampak buruknya terhadap perempuan dan anak perempuan.

Editor: Fimela Apriany

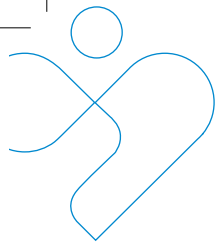


Ajari anak menenun (ilustrasi).

Sosial Ekonomi Nasional/Susenas 2021). Hanya enam negara yang memiliki 50 persen atau lebih perempuan di parlemen. Lebih dari dua pertiga dari 800 juta orang di dunia yang tidak bisa membaca adalah perempuan.

“Keinginan perempuan dan anak perempuan itu penting untuk didengar - di mana pun, dalam lingkungan pembangunan dan kemanusiaan, di ruang daring maupun luring,” kata dr. Hasto, seraya menegaskan bahwa memajukan kesetaraan gender penting dilakukan.

Memajukan kesetaraan gender, lanjut dr. Hasto, berarti mengharuskan semua elemen masyarakat mendengarkan suara perempuan, anak perempuan dan kelompok termarginalisasikan lainnya untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam mewujudkan



BKKBN Optimistis Target Pemutakhiran 2023 Tercapai

■ Penulis: Kristianto , Tresnawati

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) optimistis Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023 di seluruh Indonesia selesai sesuai target waktu. Sejumlah provinsi telah menyelesaikan 100 persen Pemutakhiran yang berlangsung selama satu bulan, dimulai 1 Juli 2023 dan akan berakhir pada 31 Juli 2023.

Hingga hari ke-26 Pemutakhiran Rabu (26/07/2023), secara nasional BKKBN telah memutakhirkan 13.824.633 data Kepala Keluarga (KK) atau 88,04 persen dari 15.701.871 target data keluarga yang dimutakhirkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik (Laptik) BKKBN Lina Widyastuti, SKM, M.A.P.S, mengatakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelesaikan 100 persen Pemutakhiran. Sebanyak 16 provinsi lain, menurut Lina persentase penyelesaian Pemutakhiran di atas 90 persen dan di atas pencapaian rata-rata nasional per hari ini.

“Provinsi yang memiliki target Pemutakhiran terbanyak, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat penyelesaian pemutakhiran telah di atas 90 persen. Hal ini tentu sangat baik karena ketiga provinsi ini target data keluarga yang paling besar,” kata Lina.

Pada hari ke-26. Provinsi Jawa Barat yang ditarget 2.761.113 telah memutakhirkan 2.518.395 data keluarga (91,21 persen). Provinsi Jawa Timur yang ditarget 2.066.146 telah memutakhirkan 1.983.340 data keluarga (95,99 persen), dan Jawa Tengah yang ditarget 1.675.510 telah memutakhirkan 1.599.191 data keluarga (95,45 persen).

Berdasarkan dashboard monitoring, lima provinsi yang telah mendekati 100 persen penyelesaian yakni Gorontalo (96,81 persen), Jawa Timur (95,99 persen), Jawa Tengah (95,45 persen), Aceh (95,19 persen), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (94,59 persen).

“Untuk provinsi yang pencapaiannya masih di bawah 75 persen agar segera melakukan mitigasi dan menyusun strategi percepatan pemutakhiran data keluarga. Masih ada waktu sampai 31 Juli ini,” ujar Lina.

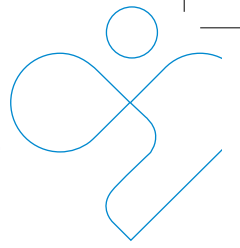
Lina mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Pemutakhiran data keluarga.

yang pencapaiannya paling rendah (32,39 persen). Sedangkan tiga provinsi yang terendah berikutnya adalah Papua Tengah (35,05 persen), Papua Pegunungan (44,73 persen), dan Papua Selatan (46,70 persen).

“Terkait kendala provinsi yang pencapaiannya masih rendah karena factor geografis dan wilayah. Bisa juga karena pelaporan dalam sistem aplikasi masih dalam proses karena kemungkinan ada kendala dalam hal pengiriman data secara elektronik. Karena ada beberapa daerah yang jaringan internetnya masih belum baik,” ujar dia.



Monev di Kabupaten Pelalawan

Sementara itu Tim Kerja Data dan Informasi BKKBN Provinsi Riau pada Selasa (25/07/2023) mengunjungi Kabupaten Pelalawan guna memantau dan mengevaluasi pemutakhiran. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau terus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023.



Petugas pendataan tengah melakukan pemutakhiran data keluarga.

Pemantauan dan evaluasi dipimpin langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalenawati Yulia bersama Tim Pokja Data dan Informasi (Datin).

Pendampingan lapangan ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada para kader setempat untuk melakukan pemutakhiran PK-23 dengan pantang menyerah, sehingga data yang dihasilkan pada PK-23 ini adalah data - data krusial yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk BKKBN namun juga untuk lain instansi sehingga dapat dirasakan manfaat yang nyata

dalam pembangunan Indonesia.

Dari data, Kabupaten Pelalawan memiliki 79.990 KK dengan target 39.795 KK yang harus didata.

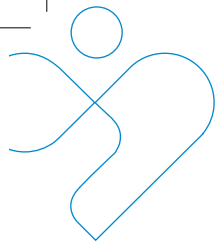
Capaian per kecamatan dapat di lihat dari data di bawah ini, Kecamatan Bandar Sei Kijang target KK 3.298, KK telah didata 2.782, Kecamatan Bunut target KK 1.362, KK telah didata sebesar 1.325, Kecamatan Pangkalan



Kerinci target KK 18.463, KK telah didata 15.891, Kecamatan Pangkalan Kuras, target KK 8.621, KK yang terdata 4.953, Kecamatan Pangkalan Lesung, target KK 2.542, KK yang terdata 1.582, Kecamatan Pelalawan, target kk 2.327, KK yang didata 2.208, Kecamatan Ukui, target KK 3.183, KK yang didata 1.052.

Capaian Pemutakhiran Data Keluarga di Kabupaten Pelalawan hingga hari ke-25 sebesar 78 persen.

Editor: Annisa H



Gerakan Inovasi Praktik Baik di Desa Bebas *Stunting* Bisa Cegah Kelahiran Bayi *Stunting*



Kepala BKKBN Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat webinar Praktik Baik Desa atau Kelurahan Bebas *Stunting*.

■ Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti

KEPALA BKKBN Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menekankan bahwa kunci untuk mencapai desa atau kelurahan bebas *stunting* adalah dengan mencegah kelahiran bayi *stunting* baru.

“Kuncinya, kami mengajak untuk tidak menghadirkan *stunting* baru. Salah satu yang ditekankan adalah jarak melahirkan harus betul-betul diatur, menyusui harus sukses. Kita tahu bahwa *spacing* atau jarak kehamilan itu sangat berkorelasi dengan *stunting*,” tutur dr. Hasto.

Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan seri keempat program webinar Praktik Baik Desa atau Kelurahan Bebas *Stunting* (*De'Best*) di 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), yang telah selesai dilaksanakan pada Senin (24/07/2023).

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, SE, MT mengatakan bahwa tujuan diadakannya webinar ini untuk menyebarkan informasi dan mengadvokasi para pemimpin daerah agar meningkatkan kepedulian mereka terhadap keselamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

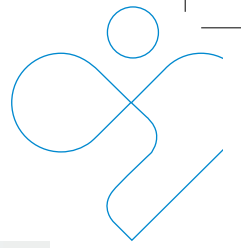
“Kegiatan ini bertujuan menyebarkan informasi Praktik Baik Desa atau Kelurahan, kemudian

mengadvokasi para pengambil kebijakan di daerah, para pimpinan di daerah untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ucap Nopian.

Acara webinar ini turut dihadiri Elizabeth Argo selaku Seksi Sosial Bhayangkari. Dia menyampaikan bahwa Bhayangkari mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk ikut berperan dalam membantu percepatan penurunan *stunting* melalui kegiatan posyandu Kemala, yang sampai saat ini sudah mempunyai binaan kurang lebih 574 posyandu.

“Dalam setiap kunjungan kerja seluruh Indonesia, ibu Ketua Umum Bhayangkari selalu menyelipkan kegiatan pemberian bantuan makanan tambahan bergizi kepada anak *stunting* dan memberikan edukasi kepada para orang tua yang memiliki balita serta ibu hamil tentang pengetahuan dan pencegahan anak *stunting*. Semoga usaha Bhayangkari ini dapat sedikit membantu mewujudkan desa dan kelurahan bebas *stunting*,” pungkasnya.

Program *De'Best* di 1000 HPK sendiri merupakan praktik baik desa atau kelurahan bebas *stunting*



2023 | Follow @BKKBNOfficial | #BerencanaluKeren | Webinar Praktik Baik Desa/Ke

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [YouTube](#) @BKKBNOfficial



Kerjasama Bebas Stunting (De'Best) di 1000 HPK Seri 4 | 24 Juli 2023 | Follow @BKK



(De'Best) di 1000 HPK Seri 4 | 24 Juli 2023 | Follow @BKKBNOfficial | #BerencanaluK

Webinar Praktik Baik Desa atau Kelurahan Bebas *Stunting*.

dalam penyelamatan 1000 HPK untuk mencegah dan menurunkan angka *stunting* dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Termasuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

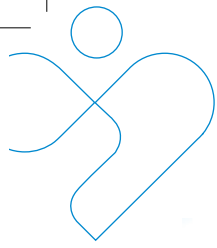
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah

desa dan pemangku kepentingan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% di tahun 2024.

Inovasi dan Kebijakan

Agenda webinar Praktik Baik De'Best di 1000 HPK Seri 4 ini dihadiri empat kepala desa atau lurah bebas *stunting* untuk menyampaikan inovasi dan kebijakan di masing-masing desa/kelurahan sebagai *best practice* atau praktik baik dalam penanganan *stunting*. Keempat desa dan kelurahan itu meliputi Desa Jelarai Selor, Desa Mentuda, Desa Maibo, dan Fesa Purwajaya.

Editor: Santjojo Rahardjo



Penekanan tombol bersama saat *launching* 'Program Keluarga Keren Bebas *Stunting*' di Pendopo Sumenep yang diikuti (kiri ke kanan) dr. Dwi Kisworo Hasto Wardoyo, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali beserta Ketua Umum Jalasenastris, Fera Muhammad Ali dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Menebar Layanan di Sumenep & Masalembu

BKKBN-TNI Berkolaborasi

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

KOLABORASI Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan TNI-AL kian mengental. Kegiatan pelayanan KB dan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Sumenep, Madura, dan Kepulauan Masalembu (Jawa Timur) menjadi kegiatan awal dari kolaborasi berkelanjutan kedua lembaga pemerintah itu.

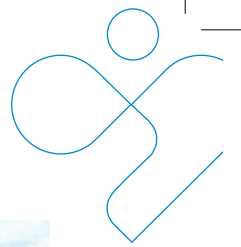
Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan *stunting*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Presiden Joko Widodo telah memberikan amanah kepada Kepala BKKBN untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan *Stunting* dengan target 14 persen di tahun 2024. Kami menyadari bahwa BKKBN tidak dapat menjalani tugas ini sendiri. Kolaborasi pentahelik menjadi strategi penting dalam upaya percepatan

penurunan *stunting*,” ujar Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), dalam berbagai pertemuan.

Sesuai amanah Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting* pada 25 Januari 2023, bahwa semua pihak perlu untuk dilibatkan.

Mengapa? Karena untuk mencapai target 14 persen prevalensi *stunting* tahun 2024 bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi dengan gotong royong semua pihak, dr Hasto meyakini dapat dicapai target yang diharapkan.

Bagi BKKBN, TNI merupakan salah satu mitra sangat strategis dengan potensi yang sangat besar. Dukungan dan komitmen seluruh jajaran TNI menjadi sangatlah berarti dalam upaya mencapai target program Bangga Kencana dan penurunan *stunting*.



Kegiatan kolaborasi TNI-AL dan BKKBN di Kabupaten Sumenep dan Kepulauan Masalembu menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kegiatan tersebut bukan hanya dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan stunting, akan tetapi menjadi praktik baik untuk dapat dilakukan di wilayah lain.

Double Burden Malnutrition

Stunting dan permasalahannya merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) yang mempunyai dampak sangat merugikan. Baik dari sisi kesehatan maupun produktivitas ekonomi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka *stunting* nasional telah turun menjadi 21,6% dari 24,4 tahun 2021. Sayangnya, untuk mencapai 14% pada 2024 masih diperlukan upaya strategis dan tenaga ekstra.

Stunting sendiri disebabkan faktor multidimensi, sehingga penanggulangannya membutuhkan konvergensi, dukungan dan keterlibatan kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, BKKBN telah menjalin kolaborasi dengan TNI dalam program percepatan penurunan stunting. Kerjasama ini diawali pada Agustus 2022 lalu.

Ketika itu, TNI telah berkomitmen mendukung dan menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagai pendamping, dan *guidance* Posyandu, Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) di semua angkatan.

Salah satu matra dalam TNI adalah TNI Angkatan Laut yang juga menjadi mitra strategis BKKBN. Strategis karena TNI-AL memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana memadai untuk menjangkau wilayah-wilayah khusus.

Kolaborasi bersama TNI-AL telah dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, Madura, dan Kepulauan Masalembu. Kegiatan bakti sosial ini dalam rangka mendukung Program ‘Keluarga Keren Bebas Stunting’, yang berlangsung pada 17-20 Juli 2023.

Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai alat juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara merupakan tujuan dari kegiatan tersebut.

Sumenep dan Masalembu

Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Luas kabupaten ini 2.093,457573 km². Jumlah penduduknya 1.135.903 jiwa. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022, menunjukkan penduduk laki-laki sebanyak 548,471 jiwa dan perempuan 587,432 jiwa.



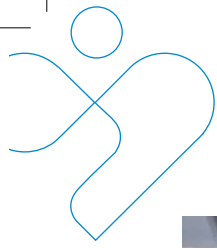
Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K), menyerahkan piagam pengukuhan BAAS kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.



Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K), menyerahkan plakat kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.



dr. Dwi Kisworo Hasto Wardoyo menyerahkan piagam pengukuhan Bunda Asuh Anak Stunting kepada Ketua Umum Jalasenastris, Fera Muhammad Ali.



Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) meninjau kegiatan pelayanan khitan yang dilaksanakan di KRI dr. Radjiman W (RJW-992) milik TNI AL.

Sementara jumlah penduduk di Kecamatan Masalembu 26,194 jiwa, di mana laki-laki 12,899 jiwa dan perempuan 13,295 jiwa.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka *stunting* di Kabupaten Sumenep sebesar 21,6%. Angka ini turun dari tahun 2021 sebesar 27,4%. Akan tetap masih berada di atas angka *stunting* di Provinsi Jawa Timur.

Sasaran kegiatan ini di antaranya keluarga berisiko *stunting*, dimana melalui kegiatan bakti sosial ini terdukung pemenuhan asupan gizi anak-anak.

Sasaran berikutnya adalah terlaksananya sosialisasi program *stunting* dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang keluarga berencana dan gizi buruk/*stunting*. Juga terselenggaranya pelayanan kesehatan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak *Stunting* dan Ketua Umum Jalasenastri sebagai Bunda Asuh Anak *Stunting*.

Launching

Kegiatan kolaborasi BKKBN - TNI-AL di kedua wilayah itu diawali dengan *launching* Program Keluarga Keren Bebas *Stunting* di Pendopo Sumenep, dihadiri Kepala

Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali beserta Ketua Umum Jalasenastri, Fera Muhammad Ali; Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) beserta dr. Dwi Kisworo Hasto Wardoyo; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

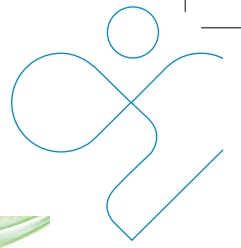
Adapun lokasi pelayanan dilakukan di dalam ruang operasi KRI dr. Radjiman W (RJW-992) milik TNI AL & Puskesmas Masalembu.

Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan di Kabupaten Sumenep, untuk katarak 14 orang, bibir sumbing 2 orang, Metode Operasi Wanita (MOW) 11 orang. Sementara di Kecamatan Masalembu, 17 orang mendapat pelayanan khitan, 18 orang implant, dan 32 screening & operasi katarak.

Pelayanan diberikan tenaga kesehatan, terdiri atas tim dr. Agung, Sp.OG dari RSAL dr. Ramlan, dan tim dr. Budi, Sp.OG dari RSUD Kirana.

Kendati kondisi gelombang tinggi di perairan Sumenep, pelayanan KB dan kesehatan di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 (RJW)-992 tetap berjalan lancar dengan melayani 11 orang peserta MOW. Selanjutnya KRI RJW-992 melakukan perjalanan menuju perairan Kepulauan Masalembu.

Adapun 49 calon akseptor MOW lainnya dilakukan di RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep bekerjasama dengan



Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) memberikan bantuan secara simbolik berupa alat teknologi tepat guna.



Deputi bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso berbincang dengan warga dalam kegiatan penyuluhan di Puskesmas Sumenep.

Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Menurut dr. Hasto, TNI-AL sebagai mitra strategis telah memberikan dukungan yang besar terhadap Program Keluarga Keren Bebas Stunting. “Kegiatan pelayanan di wilayah kepulauan dirasa sangat baik untuk dilakukan sehingga memberikan kemudahan dan mendekatkan akses pelayanan KB kepada masyarakat wilayah kepulauan,” ujar dr. Hasto.

Menurut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, TNI-AL melaksanakan program Keluarga Keren Bebas Stunting secara serentak di 14 Lantamal, mulai Indonesia

bagian barat hingga wilayah Indonesia paling timur. Kegiatan yang dilakukan ini bertujuan mencapai SDM pembangunan berkelanjutan.

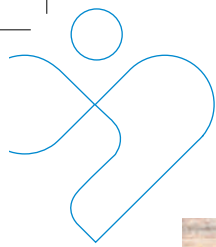
“Sejumlah kegiatan digelar di lokasi, di antaranya penyuluhan edukasi gizi dan tengkes (*stunting*), penyuluhan KB, masak menu sehat, bakti sosial dengan melaksanakan penyerahan paket menu sehat untuk tengkes dan ibu menyusui,” jelas Kasal.

Kasal berharap dengan kerja sama berbagai pihak, target 14% *stunting* yang telah dicanangkan bisa tercapai.

Editor: Annisa H



Peserta kegiatan kolaborasi BKKBN - TNI-AL foto bersama di atas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 (RJW-992).



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) memberikan sambutan pada acara peresmian Program Manunggal Air di Desa Lebak Sangka, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (25/7/2023).

Kepala BKKBN Apresiasi Program Manunggal Air dan Babinsa Masuk Dapur

■ Penulis: CFL/ Fitri Aminatul Azizah

KEPALA BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) mengapresiasi program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Air dan Babinsa Masuk Dapur yang diinisiasi oleh TNI-AD.

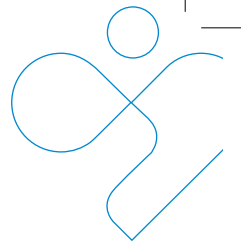
Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri acara peresmian Program Manunggal Air di Desa Lebak Sangka, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (25/7/2023).

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman, SE, MM, yang meninjau langsung pembangunan sumber air bersih ini. Hadir juga Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, SIP; Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, PHD, KEMD, dan pejabat dari

Kemensos, Kemenko PMK, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Bupati Lebak, Forkompinda dan Pejabat Daerah serta para *Stakeholder* lainnya.

“BKKBN merasa bersyukur sekali atas komitmen dan peran TNI yang sungguh luar biasa, seperti yang tadi disampaikan pak Dudung bahwa babinsa masuk dapur itu luar biasa. Jadi ini menyelesaikan masalah sekali karena peran-peran gotong royong di masyarakat terpacu oleh teman-teman Babinsa yang ada di masyarakat. Saya mengucapkan terimakasih,” ungkap Hasto.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto mengapresiasi program Manunggal Air yang diinisiasi oleh TNI-AD. Menurutnya, program ini sangatlah efektif dan berdampak besar terhadap penanganan *stunting*, khususnya pencegahan dari hulu.



Hasto mengatakan dengan diangkatnya Jenderal Dudung sebagai Duta Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) telah sukses menggerakkan seluruh komponen se-Indonesia untuk menjadi Bapak Asuh Anak *Stunting*. Banyak Kepala Daerah berlomba-lomba ingin menjadi Bapak Asuh Anak *Stunting*.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, menyebut pemerintah optimistis prevalensi *stunting* dapat turun menjadi 14 persen pada 2024, apabila seluruh pihak saling berkolaborasi dan tidak jalan sendiri-sendiri.

Moeldoko menegaskan, *stunting* merupakan masalah multisektor. Tidak hanya soal kesehatan tapi juga berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Moeldoko menilai, peresmian penggunaan air bersih menjadi salah satu bentuk intervensi program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. Mengutip sebuah hasil riset, dia mengatakan kontribusi ketersediaan air bersih pada penurunan *stunting* mencapai 40 persen.

Sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa program TNI Manunggal Air 2023 dan pendampingan penurunan *stunting*, merupakan bentuk komitmen TNI-AD untuk hadir di tengah masyarakat dalam memberikan

elayanan serta menyejahterakan masyarakat.

“Air merupakan sumber kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup. Oleh karenanya TNI AD membuat program TNI AD Manunggal Air agar kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi sehingga *stunting* akan semakin cepat tertangani,” ujar Jenderal Dudung.

Program Manunggal Air diwujudkan dengan pembuatan sumur bor di 1.345 titik yang dapat dimanfaatkan bagi 240.049 Kepala Keluarga (KK), atau lebih dari 654.000 jiwa,” ungkap Jenderal Dudung.

Jenderal Dudung juga menegaskan bahwa TNI-AD harus hadir di tengah kesulitan rakyat dan menjadi solusi, serta harus berdampak pada masyarakat.

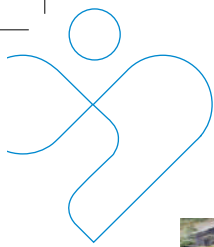
Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Dra. Ubang Sobari mengatakan BKKBN Banten pada kesempatan ini menggelar pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) implant bagi 100 akseptor di puskesmas Lebak Gedong.

“Kehamilan berisiko terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering atau dikenal dengan “4 Terlalu” dapat menyebabkan *stunting*. Oleh karena itu sangat penting menjaga jarak kehamilan. Salah satunya dengan penggunaan alat kontrasepsi ini MKJP,” kata Ubang.

Editor: Santjojo Rahardjo



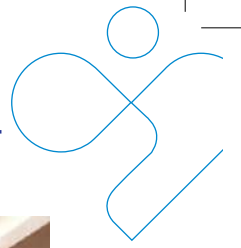
Program Manunggal Air di Desa Lebak Sangka, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten.



BKKBN LEPAS KONVOI MOBIL UNIT PENERANGAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melepas puluhan kendaraan peserta Temu Mobil Unit Penerangan se-Jawa-Sumatera (Temu Mupen Jawa) dari halaman kantor BKKBN Pusat di Jakarta, Senin (3/7/2023) pagi.

PEMBERDAYAAN KAMPUNG KB – Acara Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan stunting yang dihadiri Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, DVM, MRepSc, PhD.

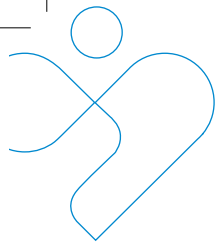




PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar acara penganugerahan penghargaan bertajuk Apresiasi dan Lomba dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 Tahun 2023, berlangsung di Hotel Whyndam Opi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (4/7/2023). Penghargaan diberikan kepada para pemenang lomba sebagai bentuk apresiasi bagi semua unsur yang terlibat dalam menyukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023.



PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Galla Dinner dan Penganugerahan tanda kehormatan dan tanda penghargaan di Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional serta Percepatan Penurunan Stunting, Selasa (04/07/2023) di Griya Agung Palembang. Penganugerahan diberikan atas komitmen dan dukungan mitra kerja dalam melaksanakan program baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



BKKBN Dukung RSUD Kabupaten Karawang Jadi *Center of Excellence* Pelayanan Ibu dan Anak

■ Penulis: Rizky Fauzia

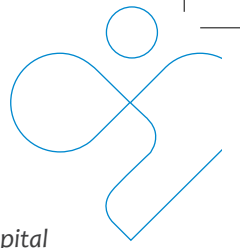
BKKBN mendukung RSUD Kabupaten Karawang (Jawa Barat) sebagai Rumah Sakit *Center of Excellence* (CoE) dalam menjalankan pelayanan ibu dan anak, khususnya di bidang pelayanan Keluarga Berencana (KB), dengan mengusulkan pelaksanaan *pre service training* bagi para tenaga kesehatan.

Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) saat menerima audiensi Plt Direktur RSUD Karawang dr Fitra Hergyana Sp. DV, MH. Kes, MM beserta jajarannya, Jumat (28/07/2023) siang, di Ruang Sekretariat Stunting BKKBN, Jakarta.

“Selama ini yang tidak jalan dan saya pingin sekali jalan itu adalah *pre service training*. Itu (RSUD Kab. Karawang) tadi kan sudah ada kerjasama dengan KOAS dari universitas, mungkin nanti bisa dari akademisi kebidanan. Maksud saya BKKBN punya alat kontrasepsi yang sebetulnya kalau (rumah sakit) beli sendiri harganya tidak murah. Kemudian perguruan tinggi punya mahasiswa yang sebetulnya mahasiswa itu untuk *material teaching*. BKKBN sering menggerakkan *material teaching* dalam bentuk akseptor dan menyediakan alat-alat kontrasepsinya,” jelas Hasto.



Audiensi Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dengan Plt. Direktur RSUD Karawang.



Kami rumah sakit pendidikan satelit, *Academy Hospital System*. RSUD Karawang merupakan kawasan industri terbesar se-Asia.”

Berada di lahan seluas 6,8 hektar dengan 503 tempat tidur, RSUD Karawang merupakan rumah sakit tipe B pendidikan, terutama obgyn. “Jadi, residen itu kita di RSUD Karawang sampai dengan KOAS, dan *fellowship*. Obgyn kami bekerja sama dengan obgyn UI, lalu juga dengan Unpad kami ada residen urologi dan residen bedah saraf, dan FH Trisakti untuk KOASnya,” katanya.

Ia juga menjelaskan RSUD Kabupaten Karawang juga sangat memperhatikan kesiapan dan kualitas SDM dan infrastruktur dalam *Center of Excellence* bagi pelayanan ibu dan anak.

“Arahan dari Kementerian Kesehatan, bagaimana RSUD ini bukan hanya medisnya tetapi nonmedisnya juga diperbaiki. Untuk SDM, karyawan di sini ada 1.243 dengan 90 dokter umum dan spesialis. Kita obgyn-nya mungkin ada enam, yang empat sudah sub-spesialis, dan dua lagi rencananya akan sub-spesialis. Transformasi yang kami laksanakan berupa perbaikan penanganan pasien, kualitas pemberi pelayanan, mutu layanan klinis, dan tata kelola rumah sakit. Transformasi infrastruktur ini konsepnya adalah modernisasi,” tandas dr. Fitra.

Editor: Santjojo Rahardjo



Plt Direktur RSUD Karawang dr. Fitra Hergyana Sp.DV, MH, Kes, MM

Menurutnya, perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Karawang bisa mengadakan pelatihan tersebut dan kemudian berpraktik di RSUD Kabupaten Karawang. BKKBN sendiri berkontribusi menyediakan akseptor KB bekerjasama dengan dinas KB di sekitar Kabupaten Karawang.

“Kalau antara perguruan tinggi, rumah sakit, dengan BKKBN, maka biar perguruan tinggi lah yang berkiprah mengadakan *training* dan sebagainya, tetapi praktiknya di rumah sakit. Akseptornya kami yang akan suplai. Kami memiliki sejumlah akseptor. Jawa Barat banyak yang akseptor MOW (Metode Operasi Wanita), sehingga rumah sakit juga bisa diturunkan untuk pelayanan MOW.”

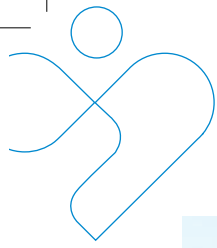
“MOW ini misalnya untuk *pre service training* untuk residen, MOPnya (Metode Operasi Pria) untuk *pre service training* untuk urologi. Lalu yang paling banyak pasang IUD, ada dokter umum dan akademi kebidanan. Namun, hari ini kita masih prihatin masih banyak dokter umum yang belum bisa memasang IUD. Padahal sayang sekali, kita ini punya alatnya, punya akseptornya,” tuturnya.

RSUD Kabupaten Karawang memang telah melakukan transformasi dan perbaikan-perbaikan infrastruktur, papar dr. Fitra Hergyana pada saat membuka acara. Ia berharap RSUD Kab. Karawang bisa menjadi CoE pelayanan bagi ibu dan anak.

“Kami saat ini jadi *Center of Excellence* Ibu dan Anak di Jawa Barat. Jadi, saat ini RSUD Karawang ada bersama pendidikan dengan FH UI, FH Unpad, dan FH Trisakti.



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) menerima plakat dari Plt. Direktur RSUD Karawang.



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (27/7/2023), di Alun-alun RTH Ratu Zalecha, Kabupaten Banjar.

Kepala BKKBN: Kader KB dan TPK Akar Program BKKBN

■ Penulis: RPT dan Risna Yulida

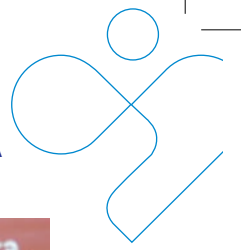
KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) mengatakan kader KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) berperan penting dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program Percepatan Penurunan Stunting.

“Program BKKBN tanpa kader KB dan TPK menjadi tidak berjalan. Karena mereka adalah akar dari program BKKBN yang akan memaknai setiap kegiatan BKKBN,” kata dr. Hasto Wardoyo pada peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (27/7/2023), di Alun-alun RTH Ratu Zalecha, Kabupaten Banjar.

Lebih lanjut dr. Hasto mengatakan pada 2035 Indonesia akan menghadapi *aging population* karena peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), terutama pada kaum perempuan.

Sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup, sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya mencegah *stunting* sejak dini, maka Indonesia harus mampu melahirkan generasi-generasi berkualitas. Sebuah generasi yang sehat, cerdas dan berpostur tinggi. Sehingga akan lahir generasi lanjut usia (lansia) yang juga berkualitas nantinya.

Pada bagian lain sambutannya, dr. Hasto mengingatkan bahwa menikah pada usia dini menjadi berisiko ketika perempuan hamil pada usia kurang dari 20 tahun.



“Panggul seorang perempuan pada masa remaja mengalami pertumbuhan sampai ukuran maksimal lingkaran panggul adalah 10 centimeter, sesuai kodrat lingkaran kepala bayi yang akan dilahirkan.”

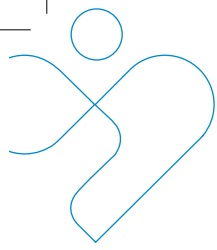
“Dan saat seorang perempuan melahirkan anak di usia belasan, lingkaran panggulnya belum mencapai ukuran maksimal, dan pertumbuhan fisiknya menjadi terhambat, sehingga akan berdampak pada kesehatannya di hari tua,” tutur dr. Hasto.

Ia juga menekankan pentingnya merencanakan kehidupan berkeluarga. Salah satunya dengan menjaga kehamilan sejak awal. “1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) penting untuk menjaga asupan nutrisi, sehingga mencegah terjadinya *stunting* pada anak sejak awal,” jelas dr. Hasto.

Menurut dr. Hasto, pada tahun 2035 struktur penduduk Indonesia akan ditandai melimpahnya penduduk usia tua. Ini terjadi karena kelahiran menjadi lebih sedikit dan usia harapan hidup menjadi lebih panjang. Karenanya generasi muda tidak banyak tetapi jumlah generasi tua meningkat.

Mirisnya, lanjut dr. Hasto, para lansia di tahun itu sebagian besar berpendidikan rendah dengan strata ekonomi juga rendah. “Jadi, kalau yang muda itu *stunting*





PEMBANGUNAN KELUARGA



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) pada peringatan Harganas Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

bisa berbahaya,” ungkap dr. Hasto.

Dr. Hasto juga mengungkapkan bahwa di tahun 2035 penduduk lansia didominasi kaum perempuan karena perempuan mempunyai usia harapan hidup lebih panjang dibanding laki-laki. “Era bonus demografi di negara ini akan dipenuhi banyak perempuan,” ujar dr. Hasto.

Pada kesempatan tersebut dr. Hasto juga menyematkan Tanda Kehormatan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, SI.Kom; Bupati Tanah Bumbu, Dr. HM Zairullah Azhar; Walikota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Arifin, SH, MH; dan Ketua TP PKK Banjarbaru, Filzah Mar’I Isa.

Juga diserahkan tanda kehormatan Dharma Karya Kencana (DKK) kepada Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjar, H. Mansyur.

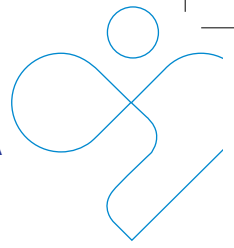
Tanda penghargaan itu diberikan melalui sejumlah indikator penilaian. “Satu di antaranya yang penting

adalah percepatan penurunan *stunting*, beserta indikator lainnya,” tutur dr. Hasto.

Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutan yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan SH, mengatakan keluarga adalah perisai dalam menghadapi segala persoalan. Karena itu, kualitas keluarga memegang peranan penting dalam memanfaatkan peluang bonus demografi yang harus dapat ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan.

Sebagaimana diketahui, celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2045. Maka, peluang tersebut harus bisa dimanfaatkan melalui percepatan peningkatan kualitas SDM. Salah satu faktor penentunya adalah percepatan penurunan *stunting*.

Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi *stunting* Indonesia berada pada angka 21,6%, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan pada angka 24,6%. Untuk mencapai



...keluarga adalah perisai dalam menghadapi segala persoalan. Karena itu, kualitas keluarga memegang peranan penting dalam memanfaatkan peluang bonus demografi yang harus dapat ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan

target prevalensi *stunting* 14% pada tahun 2024 tentu bukan hal mudah. Apalagi dengan waktu yang terus berjalan. “Namun kita tidak boleh menyerah tidak ada yang tidak mungkin kalau seluruh pihak bergotong-royong secara aktif,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, momentum peringatan Harganas ke-30 hendaknya menjadi daya ungkit keberhasilan program dan menjadi penguat komitmen bersama untuk percepatan penurunan *stunting* di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Ramlan MA menyampaikan, Harganas ke 30 Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kalsel mengusung tema ‘Bergerak Bersama Menuju Keluarga Bebas *Stunting* untuk Indonesia Maju’.

Tujuannya, untuk mensinergikan gerak dan langkah keluarga Indonesia mencegah *stunting*. Kemudian meningkatkan peran *stakeholder*, tokoh masyarakat dan keluarga dalam pembangunan keluarga. “Yang tidak kalah penting untuk meningkatkan kepedulian keluarga Indonesia dalam pencegahan *stunting*,” ujarnya.

Bertabur Penghargaan

Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 di Kalimantan Selatan bertabur penghargaan untuk Provinsi Kalimantan Selatan dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Penghargaan itu diraih sebagai Juara I Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) kelompok target 15.000 - 40.000 Akseptor; Juara 2

Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) Cakupan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA); Terbaik 3 Apresiasi Piawai DAK Kategori 2 Provinsi yang membina Kabupaten / Kota dengan Total Anggaran DAK antara 50 - 100 milyar.

Adapun penghargaan dan apresiasi yang diberikan untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Juara 1 Kab/Kota Terbaik TK Nasional Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) Kelompok Target >2000 Akseptor; Kabupaten Hulu Sungai Selatan juara 3 Kab/Kota Terbaik Tingkat Nasional Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) Cakupan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Penerima penghargaan berikutnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara Juara 2 Kab/Kota Terbaik Tingkat Nasional Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) Kelompok Target <750 Akseptor; dan Kabupaten Tanah Laut Juara 3 Kab/Kota Terbaik dalam Melaksanakan Praktik Baik Audit Kasus *Stunting* Indonesia (Petik Aksi) 1 dan 2 Tahun 2023.

Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Kalimantan Selatan telah diterima di acara puncak kegiatan Harganas ke 30 di Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan itu Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, SI.Kom mengatakan Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah 4.688,00 km persegi dengan penduduk sebanyak 555.611 jiwa, terdiri dari 20 kecamatan dan 290 Desa serta kelurahan.

Bagi Saidi, kegiatan pada peringatan Harganas tahun ini menjadi poin penting kebangkitan bersama anak bangsa secara nasional. “Secara khusus pada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banjar dalam menyukseskan program pemerintah menurunkan angka *stunting* sebesar 14% untuk Indonesia maju serta dalam menyiapkan Generasi Indonesia emas 2045 dan bonus demografi menghadapi era globalisasi,” ujar Bupati.

Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi *stunting* di Banjar sebesar 40,2%. Namun daerah ini tercatat di peringkat kedua terbaik penurunan angka *stunting* dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. “Prevalensi *stunting* menjadi sebesar 26,4% pada tahun 2022,” ujar Saidi Mansyur.

“Bagi kami, momentum Harganas tahun ini menjadi ajang sosialisasi kepada keluarga untuk membantu percepatan penurunan *stunting* dengan berbagai macam inovasi yang ada seperti Program Manis Bapanting, *Say No Ting-ting* (Kampanye Cegah *Stunting* Anti Bullying) serta Program Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* dan Dahsat (Dapur Sehat Atasi *Stunting*),” ujar Saidi Mansyur menambahkan.

Editor: Santjojo Rahardjo

Nur Nadlifah

Komitmen dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

■ Penulis: Dadang

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Hj. Nur Nadlifah, S.Ag berkomitmen tegas untuk mendukung program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, hingga prevalensinya berada di angka satu digit. Untuk mencapainya, percepatan penurunan *stunting* harus dilakukan bersama di setiap lapisan masyarakat.

“Harus bisa satu digit. Tidak boleh masih dua digit. Indonesia itu kepulauan, masyarakatnya luas, kalo 0% sepertinya masih menghayal. Tapi ya kalau Allah sudah menghendaki, ya bisa saja. Intinya kita harus di bawah dua digit,” kata Nur Nadlifah dalam satu pertemuan beberapa waktu lalu di Semarang (Jawa Tengah).



Hj. Nur Nadlifah, S.Ag

Komitmen percepatan penurunan *stunting* Nur Nadlifah bukanlah komitmen yang baru seumur jagung. Ia mulai serius terhadap masalah *stunting* sejak tahun 2005. Sejak awal masuk pimpinan pusat Fatayat NU, ia mengambil isu tentang Kesehatan Ibu dan Anak, serta *human trafficking*. Diketahui, kesehatan ibu dan anak akan mengerucut pada persoalan *stunting*, yang kala itu prevalensinya tinggi.

Bagi Nur Nadlifah permasalahan *stunting* adalah masalah yang harus segera diselesaikan dan perlu kerjasama semua pihak. Masalah yang tidak sederhana, karena masalah ini menyangkut pola hidup, pola pikir, hingga pola perilaku terhadap diri dan anak.

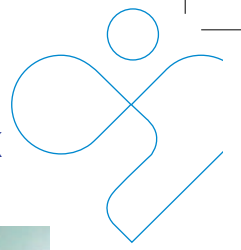
“Maka, kalau ditanya komitmen, saya sangat berkomitmen. Begitu saya dilantik di DPR RI, yang saya ambil adalah komisi IX. Karena di situ urusannya kesehatan dan kesehatan ibu dan anak, kependudukan. Di dalamnya ada *stunting*,” tegas Nadlifah.

Ia mencontohkan sepak terjangnya di Jawa Tengah, dengan *stunting* masih di angka 20,8%. Menurutnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur menjadi barometer pembangunan, maupun perilaku. Maka, jika di tiga provinsi tersebut masalah *stunting* masih tinggi, itu artinya indikator keberhasilan peningkatan kualitas, juga pembangunan manusia di Indonesia masih rendah.

“Jawa memang harus digempur banget. Tentu dengan tidak meninggalkan daerah daerah lain. Karena Jawa penduduknya paling tinggi. Penduduk yang banyak ini, penanganannya juga perlu yang serius,” kata Nadlifah.

Komitmennya tersebut kemudian terwujud ke dalam program yang ia gerakkan bersama masyarakat. Seperti yang ia lakukan bersama kader Fatayat NU, Muslimat NU. Ia turun bersama, bareng bareng menangani kasus *stunting*.

“Seperti di dapil saya, di Tegal, Brebes. Di Tegal teman teman fatayat membuat program Sahabat Asuh. Apa yang dilakukan Sahabat Asuh, adalah kader kader



Hj. Nur Nadlifah, S.Ag saat memberi sambutan.

mendampingi keluarga yang memiliki potensi *stunting*. Baik remaja sebelum menikah, yang sedang hamil, dan juga setelah lahir,” ungkap Nadlifah.

Tak selesai di lahir bayi saja, ia pun menjelaskan bahwa kader tetap mendampingi masa pemberian ASI, dan masa pemberian makanan pendamping ASI. Sehingga masa eksklusif ASI selama 6 bulan dipastikan betul dilakukan ibu dengan memberikan ASI kepada bayinya dan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, agar kualitas ASI nya bagus. Begitu juga pada saat anak sudah dapat makanan tambahan, dipastikan makanan tambahan ini memenuhi gizi.

Kesejahteraan keluarga ibu hamil, ataupun anak berisiko *stunting* menjadi perhatian Nadlifah. Maka dari itu, lagi lagi rantai penuntasan *stunting* tidak selesai di pengawalan pemberian ASI dan MPASI saja, Nadlifah tetap mengarahkan kader kader nya untuk memperhatikan kondisi ekonomi dari keluarga berisiko anak *stunting*. Sehingga sikap untuk melakukan *treatment* penanganan *stunting* bisa diputuskan. “Kalau kebetulan di keluarga ini ada kesulitan ekonomi, maka kader kita yang melakukan *supply* makanan. Menyuaip langsung dari tangan kader kita ke mulut si bayi. Dan *alhamdulillah* sudah ada pergerakan,” kata Nadlifah

Lain di Kabupaten Tegal, lain pula di Kabupaten Brebes. “Gerakan Sadar Gizi” GERSAGI menjadi program yang dilakukan Nur Nadlifah bersama masyarakat untuk mengentaskan masalah *stunting*. “Sebetulnya prinsip kerjanya dari GERSAGI ini sama, cuma namanya beda. Soal nama ini memang tidak kita seragamkan. Kita beri

ruang kepada masyarakat untuk berkreasi membentuk gerakan sendiri,” kata Nadlifah.

Kendala sesungguhnya

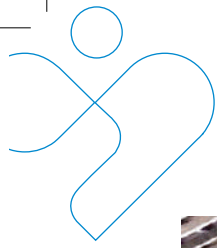
Aktif turun ke lapangan membuat Nadlifah menemukan kendala sesungguhnya terhadap upaya penurunan *stunting*. Perilaku masyarakat, kebiasaan hidup tidak sehat, membuat *stunting* tidak bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Cita cita lebih besarlah yang kemudian membuatnya mampu menguatkan tekadnya untuk menurunkan *stunting*, demi Indonesia Hebat, Generasi Emas di tahun 2045.

“Ada beberapa orang yang belum bisa keluar dari *habbitnya* dia. Misalnya, ada yang bilang saya suka nya makan mie instan, katanya ‘aku kalo ga makan mie, kepala ku itu puyeng. Aku kalo makan mie baru doyan makan’. Padahal mie instan ini dari bumbu nya saja sudah bermasalah. Mie nya butuh waktu lama buat dicerna.”

“Untuk merubah ini, mengganti dengan makan telur itu cukup susah. Alhasil, kita masih selalu dalam tahap menyadarkan masyarakat,” ungkap Nur Nadlifah.

Tak lupa ia pun berterimakasih kepada masyarakat yang mau terbuka, dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Ia pun berharap agar generasi ke depan memiliki daya saing. Generasi untuk 30 40 50 tahun mendatang akan seperti apa, kata Nadlifah, harus ditentukan dari hari ini. Tidak hanya makanannya saja, tapi juga membangun pola pikir dan karakter. Dan semua itu tidak bisa sendiri, harus dikerjakan bersama.

Editor: Reni/Santjojo Rahardjo



Kegiatan sosialisasi percepatan penurunan stunting di Bali.

Ketut Kariyasa Sasar Desa Kantong *Stunting*

■ Penulis: Nur Octavia Dian R

ANGGOTA Komisi IX DPR-RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, SP berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Bali, khususnya melalui program percepatan penurunan *stunting*.

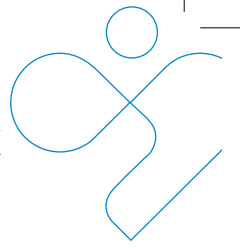
Hal tersebut ditunjukkan olehnya dalam kerjasama yang dilakukan Komisi IX DPR-RI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, berupa kegiatan Sosialisasi Percepatan Penurunan *Stunting* secara langsung ke masyarakat di beberapa wilayah Provinsi Bali.

Melalui pertemuan sosialisasi tersebut, beberapa hari lalu, Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan komitmen dan kepeduliannya itu. Terlebih sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, ia memang harus menaruh perhatian khusus pada permasalahan tersebut.

“Kesehatan ini tentunya sangat penting. Dilihat dari pandemi Covid-19 tahun kemarin, dampaknya sangat berpengaruh kepada kualitas pertumbuhan ekonomi, khususnya Bali yang mengutamakan sektor pariwisata. Perlu perhatian khusus dalam penanganan kesehatan, termasuk *stunting*,” ucapnya.



Ketut Kariyasa berbincang dengan anak-anak.



Terkait *stunting*, putra daerah Bali asal Buleleng ini juga menekankan bahwa masyarakat Bali tidak boleh lengah dengan hasil prevalensi *stunting* di Bali yang sudah menyentuh satu digit yaitu 8 persen, dan merupakan terendah secara Nasional.

“Secara nasional *stunting* sudah turun menjadi 21,6 persen saat ini, dan Bali berada di 8 persen yang merupakan terendah se-Indonesia. Namun, kita terus berupaya menurunkan kasus *stunting* dengan cara menasar sasaran dan langsung memberikan sosialisasi dan bantuan, khususnya bagi keluarga berisiko *stunting*,” kata Kariyasa Adnyana.

Menurut Kariyasa Adnyana, pemahaman masalah *stunting*, baik itu pencegahan, penanganan hingga pengawasannya harus dilakukan secara lintas sektor. “Bukan lagi hanya dari sektor kesehatan, tapi juga sektor lain. Sektor-sektor yang menunjang proses terjadinya *stunting* dan program-program yang saling disinergikan. Semisal, BKKBN dan anggota DPR RI yang menasar desa-desa yang mempunyai kantong-kantong *stunting*,” tutur Kariyasa Adnyana.

Saat perjumpaan dengan warga masyarakat pada kegiatan sosialisasi itu, Kariyasa Adnyana memberikan bantuan langsung kepada keluarga berisiko *stunting*, di depan 400 warga yang hadir pada sosialisasi itu. Ini menjadi wujud komitmen Kariyasa Adnyana dalam mengentaskan *stunting*.

Dijelaskan juga oleh Kariyasa Adnyana bahwa hasil penelitian mengungkapkan bahwa salah satu penyebab *stunting* adalah pernikahan anak. Tentu ini juga menjadi perhatian serius yang harus disosialisasikan ke tengah masyarakat luas.

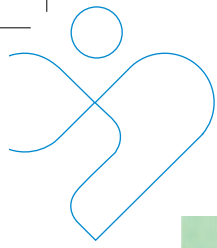
“Perencanaan menjadi hal yang sangat penting. Apalagi menyangkut pernikahan di mana bagi wanita di usia minimal 21 dan laki-laki di usia minimal 25,” ujarnya.

Ia menegaskan, Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata menuntut masyarakatnya sehat jasmani dan rohani. “Bayangkan kalau banyak penduduk Bali yang sakit, bagaimana wisatawan mau datang? Jadi, isu kesehatan sangat berpengaruh pada pariwisata, selain keamanan dan faktor alam,” pungkasnya.

Editor: Santjojo Rahardjo



Ketut Kariyasa berdialog dengan warga.



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menghadiri Porseni IpeKB di GOR Trisanjaya, Slawi, Kabupaten Tegal..

Porseni IPeKB

Ganjar Pranowo Puji Peran Penyuluh KB

■ Penulis: Aulia F.D

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) hadir dalam Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) se-Jawa Tengah yang digelar di Gor Tri Sanjaya Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/07/2023) sore.

Dalam perhelatan dua tahunan yang diikuti sekitar 1.600 penyuluh KB dari kabupaten/kota se – Jawa Tengah itu Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutan penutupan Porseni menyampaikan pujian dan kekaguman kepada para penyuluh KB dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

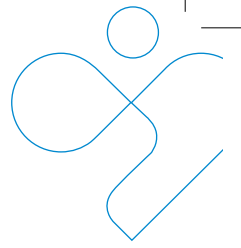
“Pak Hasto (Kepala BKKBN), Bapak, Ibu dan teman-teman penyuluh. Saya kalau kunjungan, pertanyaan saya pasti paket. Ada berapa yang *stunting*. Ini jadi *test case*,

saya tes kades-nya (kepala desa), kadang-kadang tidak hafal. Tapi kalau bidan, penyuluh KB itu pasti tas tes, sat set (cepat dan tanggap),” kata Ganjar Pranowo yang disambut riuh tepuk tangan para penyuluh KB.

Ganjar juga menyebutkan bahwa kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat lini lapangan menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya penanganan *stunting*, salah satunya peran para penyuluh KB yang kembali ia puji lagi.

“Tadi saya melihat penanganan balita, ibu hamil, termasuk yang *stunting*, waktu di Banyumas, saya tanya ada ga yang *stunting*, (jawabnya) tidak ada, itu berarti semangatnya terjadi, ada aksinya (kolaborasi), konkret, pasti penyuluhnya juga rajin,” ujar Ganjar.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pemerintah



Jawa Tengah selalu fokus dan terus bekerja dalam upaya penanganan *stunting* tanpa perlu memperdebatkan sumber data yang digunakan sebagai rujukan.

“Banyak yang nesu (marah). Pak Ganjar ini nggak enak kalau kita kayak gini, nanti dikira kita tidak bekerja. Ra sah emosi, tenang wae (jangan emosi, tenang saja). Justru sekarang bekerja kita jadi harus lebih keras agar nanti dalam survei di SSGI, kita bisa mencatat angka yang mendekati,” ujar Bapak satu anak tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi *stunting* di Jawa Tengah berada di angka 20,8% sedang menurut data E – PPGBM (Elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 prevalensi *stunting* sebesar 11,9%.

Meskipun mengalami perbedaan, selama kurun waktu lima tahun ke belakang, masing-masing pengukuran tersebut menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.

Apresiasi Program *Jo Kawin Bocah*

Sementara itu Kepala BKKBN, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam sambutannya memberi apresiasi kepada para Penyuluh KB di Jawa Tengah.



Tugas penyuluh itu, mulai dari yang mau nikah, yang hamil sampai yang melahirkan, sampai yang mau KB.

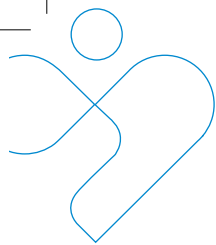
Semua menjadi tanggungjawab penyuluh KB dengan pasukannya, Tim Pendamping Keluarga, termasuk juga programnya pak Ganjar *Jo Kawin Bocah*

“Ini (porseni) merupakan murni inisiasi dari para Penyuluh di Jawa Tengah. Kreatif sekali. Penyuluh KB itu biasanya kalau ketemu itu lombanya ya penyuluhan. Tapi baru kali ini, penyuluh KB kumpul, yang diawali di Jawa Tengah, lombanya adalah olahraga dan seni. Ini luar biasa,” kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada penyuluh KB di Jawa Tengah karena kegiatan porseni ini dapat diselenggarakan dengan sukses meskipun berada di tengah-tengah gempuran tugas dan kewajiban para penyuluh KB yang begitu banyak dan padat.



Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) memberikan sambutan pada Porseni IpeKB di GOR Trisanjaya, Slawi, Kabupaten Tegal.



Selain itu, ia juga meminta seluruh penyuluh KB untuk selalu mendukung program-program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penanganan *stunting*, salah satunya program *Jo Kawin Bocah*.

“Tugas penyuluh itu, mulai dari yang mau menikah, yang hamil sampai yang melahirkan, sampai yang mau KB. Semua menjadi tanggungjawab penyuluh KB dengan pasukannya, Tim Pendamping Keluarga, termasuk juga programnya pak Ganjar *Jo Kawin Bocah*,” jelas dokter spesialis kebidanan itu.

Menurut Hasto, program *Jo Kawin Bocah* yang digagas Gubernur Jawa Tengah merupakan program yang memiliki makna sederhana namun memiliki aksi dan gerak yang luar biasa.

Program *Jo Kawin Bocah* merupakan gerakan yang lahir dari kesadaran masyarakat sebagai upaya pencegahan pernikahan anak dengan melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa dan komunitas.

Hasto mengatakan dirinya tidak pernah ragu untuk menyampaikan program *Jo Kawin Bocah* tersebut di forum – forum nasional dan juga di setiap daerah dimana ia melakukan kunjungan kerja sebagai upaya untuk

memberikan contoh gerakan yang mampu memberikan dampak terhadap penurunan *stunting*.

Dalam gelaran tersebut, hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo, Bupati Tegal Dra. Hj. Umi Azizah, Deputi Advokasi, Penggerak dan Informasi BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, MM, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih, SH, Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah, Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM serta seluruh Kepala Dinas Pengelola Program KB Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah.

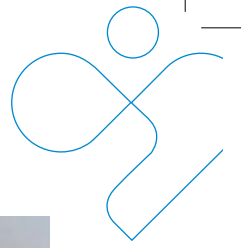
Pada penutupan gelaran posreni tersebut, juga dibacakan ikrar “Gerakan 2 Telur Tiap Penyuluh KB bagi Keluarga *Stunting*” dari para penyuluh KB se-Jawa Tengah yang diwakili oleh para pengurus IPeKB Jawa Tengah. Ikrar tersebut merupakan wujud komitmen dan dukungan seluruh penyuluh KB se-Jawa Tengah sebagai Bapak dan Bunda Asuh *Stunting* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Jawa Tengah.

Porseni Penyuluh KB itu telah selesai menyelenggarakan berbagai cabang lomba, diantaranya futsal, tenis meja, gobak sodor, bakiak, karaoke, band dan senam.

Editor: Kristianto



Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo didampingi Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) meninjau stand pada Posreni IPeKB.



Pelatihan Offline South- South Triangular Cooperation (SSTC) tentang Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dan Pemimpin Agama Muslim.

Cegah Perkawinan Anak dan *Stunting* **BKKBN Kenalkan Aplikasi Elsimil ke South South Triangular Cooperation**

■ Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti

BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Agama telah mengimplementasikan aplikasi elektronik bagi calon pengantin. Aplikasi ini untuk mengetahui data kesehatan seperti berat badan, tinggi badan, hemoglobin dan lingkaran lengan atas serta perilaku merokok.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, DVM, MRepSc, PhD, yang mewakili Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K), dalam sebuah kegiatan pelatihan, Senin (24/07/2023), di Surabaya.

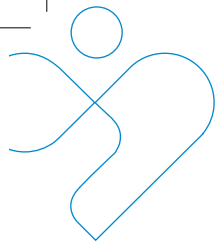
Pada Pelatihan *Offline South- South Triangular Cooperation* (SSTC) tentang Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dan Pemimpin Agama Muslim (*Muslim Religious Leaders/MRLs*) di bidang *Health Reproductive, Family Planning*, Pencegahan Pernikahan Anak dan *Stunting* itu, Rizal Damanik mengatakan

dengan kerjasama ini setiap calon pengantin (catin) harus menginput data melalui aplikasi elektronik elsimil (Siap Nikah Siap Hamil).

“Jika ada masalah dengan status gizi yang dapat menyebabkan *stunting*, maka tim pendukung keluarga akan memberikan pendampingan seperti pemberian penyuluhan, perbaikan gizi dari fasilitas kesehatan dan masyarakat,” ujar Rizal Damanik.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, *stunting* turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Target yang harus dicapai tahun ini adalah 17,8 persen.

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama BKKBN dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan *United Nations Population Fund* (UNFPA), di Surabaya, dari 23-29 Juli 2023. Pelatihan ini dihadiri negara peserta: Burundi, Ethiopia, Nepal, Malaysia, Filipina, dan Myanmar.



KIPRAH

Program pelatihan ini mencakup berbagai mata pelajaran, baik dalam program kelas, maupun kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Islam, Sekolah Tinggi Islam, sekolah asrama Islam, Asosiasi Wanita Muslim Indonesia, Kantor Urusan Agama, Kantor Walikota Surabaya.

Melalui kegiatan ini, BKKBN ingin berbagi pembelajaran dan praktik terbaik Indonesia dalam meningkatkan keterlibatan ulama dalam Program Keluarga Berencana dengan peserta dari berbagai negara dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Rizal Damanik sangat berharap bahwa pengalaman peserta selama mengikuti kegiatan akan memberi kesempatan untuk melihat program negara peserta yang mungkin serupa atau berbeda dari program BKKBN.

Pada kesempatan yang sama *Representative in Indonesia United Nations Population Fund* Anjali Sen menambahkan bahwa pelatihan khusus ini merupakan salah satu cara untuk berbagi dan bertukar praktik baik yang dapat membantu negara lain.

Kemitraan strategis antara pemerintah dan tokoh agama Islam di bidang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pencegahan perkawinan anak, dan pengurangan *stunting* merupakan upaya vital untuk mencapai tiga hasil transformatif. Ketiganya adalah nol kematian ibu yang dapat dicegah, nol kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, dan nol kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya.

Anjali juga menyampaikan, salah satu masalah prioritas mendesak yang sekarang ditangani UNFPA dalam kemitraan ini adalah pencegahan perkawinan anak.

Perkawinan anak tidak hanya melanggar hak-hak anak perempuan tetapi juga berdampak pada

kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan.

Dengan bekerja bahu membahu, Pemerintah Indonesia dan MRLs telah meningkatkan kesadaran tentang dampak merugikan dari perkawinan anak, mengadvokasi reformasi hukum, dan menyediakan sistem dukungan bagi anak perempuan berisiko dan keluarga mereka.

Selain itu, pengurangan *stunting*, sebagai salah satu prioritas pemerintah saat ini, patut menjadi perhatian. *Stunting* – gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi – memiliki implikasi jangka panjang baik bagi individu maupun masyarakat pada umumnya. “Dengan melibatkan pemimpin agama Muslim dalam mempromosikan praktik nutrisi yang tepat dan mengadvokasi gaya hidup sehat, kami dapat memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai potensi penuh mereka, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka,” ucap Anjali.

Sementara Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti mengatakan, “Bukan hanya BKKBN yang bicara tentang MRLs, mungkin bisa dilihat lagi Indonesian ini *well-known* dengan Indonesia moderat di mana Jawa Timur juga salah satu *centernya*.”

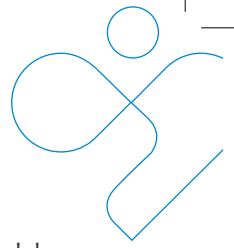
Lanjut Noviyanti, “Kita bisa dicontoh oleh negara lain karena kita ada di tengah dalam keislaman dan bukan dalam posisi sebagai negara maju sehingga secara contoh-contoh di lapangan lebih relevan dan bisa ditiru. Itu kenapa Indonesia menjadi salah satu *leading* dalam SSTC,” tambah Noviyanti.



Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, DVM, MRepSc, PhD



Peserta pelatihan Offline SSTC tentang Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dan Pemimpin Agama Muslim.



Stunting di Jawa Timur

Sementara itu Kepala Bidang Diklat RSUD dr. Soetomo, Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp. PP, KPTI, FINASIM, menjelaskan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan *stunting* pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka *stunting* di Provinsi Jawa Timur sebesar 19,2 persen, sementara di tingkat nasional 21,6 persen. “Tantangan untuk kita semua, khususnya untuk kami, bagaimana berkolaborasi dalam menurunkan angka *stunting* di Jawa Timur,” ujar dr. Erwin.

Sunting tidak lepas dari isu yang mungkin beririsan dengan angka kematian ibu dan bayi. Meskipun angka kematian ibu tahun 2022 mengalami penurunan, namun kata dr. Erwin, “Target kita tetap, bahwa pada prinsipnya angka kematian ibu dan bayi bisa dicegah sehingga harusnya bisa diturunkan jauh lebih bawah lagi.”

Menurut dr. Erwin, upaya menyelesaikan masalah *stunting* terutama terletak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). “Tetapi jangan lupa bahwa mulainya (intervensi) pada saat remaja. Supaya pada saat sudah hamil dan menyusui dan seterusnya kita bisa betul-betul mendapatkan (bayi) yang baik.”

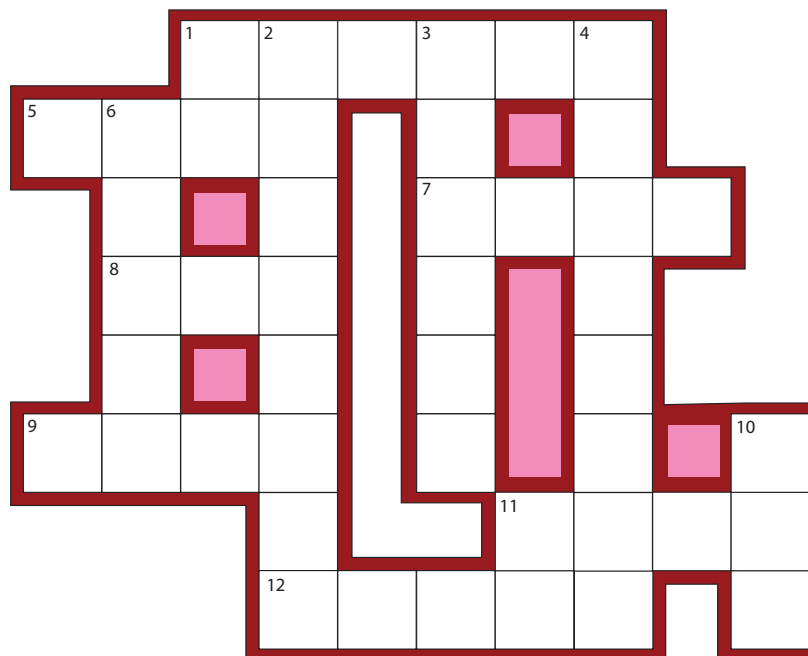
“Ini adalah contoh bagaimana kolaborasi pelatihan pada hari ini sangat kita butuhkan. Bisa dilihat di sini bahwa intervensi spesifik memang tugas kami di bidang kesehatan. Namun ada intervensi sensitif yang mungkin bisa terkait dengan yang lain,” jelas dr. Erwin.

Dr. Erwin menandakan bahwa pernikahan dini harus betul-betul dicegah. Untuk itu, pemahaman tentang kesehatan reproduksi harus dibangun di tengah masyarakat, termasuk remaja. Ini karena masih masyarakat dan remaja belum paham tentang manajemen kesehatan reproduksi.

Editor: Santjojo Rahardjo

TEKA-TEKI SILANG

TTS No.1/VII/23



PERTANYAAN

Mendatar

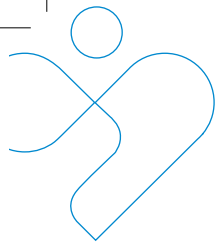
- Masakan, pemberian atau tambahan
- Timbul secara mendadak dan cepat memburuk (penyakit)
- Beras yang telah dimasak dengan cara direbus atau dikukus
- Rencana Aksi Nasional
- Survei Status Gizi Indonesia
- Bapak Asuh Anak Stunting
- Tidak berhasil; tidak tercapai

Menurun

- Masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak
- Tidak tinggi/kerdil
- Bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri
- Kurang berdaging; tidak gemuk
- Air Susu Ibu



Menangkan voucher pulsa senilai Rp 100.000 untuk 5 pemenang. Jawab pertanyaan pada kolom TTS dengan benar dan kirimkan jawabannya melalui mediacenter@bkkbn.go.id. Pemenang akan diundi dan diumumkan di Sahabat Keluarga edisi berikutnya.



Pelayanan KB implan.

Daerah Istimewa Yogyakarta Raih Apresiasi Terbaik dalam Penyerapan Dana BOKB *Stunting*

■ Penulis: FX Danarto SY

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengapresiasi serapan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada Semester Pertama tahun 2023 ini, dana BOKB kabupaten/kota di Provinsi DIY terserap 38,65 persen dan jauh di atas angka rata-rata nasional 17,15 persen.

Dana BOKB diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota khusus untuk mendanai operasional program Kependudukan dan KB, termasuk pelayanan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*. Dana BOKB selama ini menjadi sumber dana utama pelayanan KB dan penurunan *stunting* oleh pemerintah kabupaten dan kota di DIY.

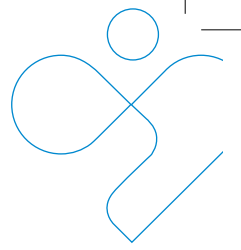
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi *stunting* terendah keempat di Indonesia yakni 16,4 persen.

“Apresiasi tersebut terutama dari disiplin penggunaan dana yang terlihat dari penyerapan anggaran semester pertama tahun 2023. Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat pertama untuk BOKB yang terserap yakni 38,65 persen. Sementara secara nasional serapan dana BOKB baru mencapai 17,15 persen,” kata Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi DIY Zainal Arifin, kemarin.

Sedangkan untuk DAK Fisik, Zainal Arifin mengatakan DIY menduduki peringkat kedua dengan serapan 25,81 persen di bawah Kalimantan Utara dengan penyerapan anggaran sebesar 40,65 persen. Secara nasional penyerapan DAK Fisik BOKB baru mencapai 5,52 persen.

Zainal Arifin menyebutkan apresiasi dari BKKBN RI itu disampaikan dalam Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) Perwakilan BKKBN DIY bersama Organisasi Perangkat Daerah pengampu Kependudukan dan KB pada Senin, 17 Juli 2023 yang mengevaluasi capaian sampai dengan bulan Juni 2023.

Editor: Kristianto



Peresmian sekolah lansia.

Sekolah Lansia di Bangka Belitung

Keterlibatan Swasta dalam Bahagiakan Orang Tua

■ Penulis: Libea Aramti

SEKOLAH Lansia Hebat Mentari yang berada di Kelurahan Ketapang, Kota Pangkalpinang menjadi sekolah Lansia pertama besutan BKKBN Provinsi Bangka Belitung.

Selabat Mentari diresmikan pada 15 Mei 2023. Sekolah Lansia ini diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, S.T, M.Si dan dihadiri Inspektur Utama BKKBN RI Ari Dwikora Tono di Rumah Data Rusunawa Kecamatan Pangkalbalam.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang memberi semangat kepada para lanjut usia atau Lansia dalam rangka mewujudkan Lansia yang Smart dan Tangguh yakni Lansia yang sehat, mandiri, aktif, kolutif dan bermartabat.

“Semangat ibu-ibu, karena harus semangat, ini penting, Lansia bukan berarti tidak semangat. Sekolah Lansia ini merupakan satu-satunya yang ada di Bangka Belitung, alhamdulillah setelah ini kabupaten lain akan mengikuti jejak ini. Sekolah lansia merupakan pengembangan dari bina keluarga lansia yang dibina oleh Dinas PPPAKB. Sekolah Lansia dijadikan sebagai wadah

konsultasi, informasi dan edukasi bagi lansia,” ujarnya.

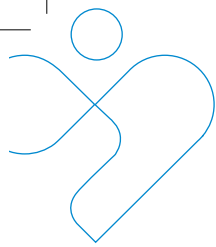
Selanjutnya Ari Dwikora Tono mengatakan, pendirian sekolah Lansia merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam memberdayakan warga lanjut usia di daerah.

“Sekolah Lansia menjadi wadah pembelajaran, terutama yang masih potensial dalam keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat,” kata Ari.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Irzal mengatakan terdapat tujuh kader yang ditempatkan pada sekolah Lansia. Ketujuh kader tersebut sangat berpengalaman dalam memberi pembinaan kepada warga lansia agar sekolah lansia makin maju. Sebelumnya kader ini sudah mendapatkan pembekalan mengenai sekolah lansia.

Untuk siswa sekolah lansia yang ada di Selabat Mentari Kampung KB, Rusunawa Kelurahan Ketapang ada 20 orang dengan harapan adanya sekolah ini para lansia bahagia, umur lebih panjang, dan tentunya lebih produktif.

Editor: Emah Suebu



dr Hasto Menjawab

• Kesehatan Reproduksi

Menentukan Masa Subur

Pertanyaan:

Halo Dokter Hasto. Saya mau tanya. Dok, bagaimana cara saya menentukan masa subur, sementara menstruasi saya jadwalnya tidak normal?

Rani Mukherji (Sumber: TikTok BKKBN)

Jawab:

Setiap wanita memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda. Siklus menstruasi yang normal terjadi pada interval waktu 21-35 hari dan bisa berlangsung selama 2-7 hari. Namun, tidak semua wanita memiliki siklus yang normal.

Ada cara tersendiri dalam menentukan masa subur. Kita harus menghitung selama 3 bulan atau



lebih, kemudian menandai tanggal-tanggal untuk siklus menstruasi terpanjang dan yang terpendek.

Setelah mengetahui hal tersebut, kita dapat menghitung dengan cara mengurangi siklus menstruasi terpanjang dan terpendek dengan 14 hari. Dari hasil tersebut akan diketahui perkiraan masa subur.

Contohnya siklus menstruasi yang pendek 22 hari dikurang 14 hari. Maka masa subur jatuh di hari ke 8.

Sementara, siklus menstruasi terpanjang 40 hari dikurang 14 hari. Maka masa subur jatuh hari ke 26.

Dengan kondisi seperti ini, yang terpendek masa suburnya jatuhnya hari ke 8 sementara yang terpanjang hari ke 26. Sehingga rangenya jadi panjang sekali. Oleh karenanya orang yang tidak teratur menstruasi sulit menentukan masa suburnya.

Karena itu, saran saya, bagi yang siklus menstruasinya tidak teratur saat ini ada ada Alat yang dapat dengan mudah menentukan kesuburan wanita.

Pertama adalah USG yang dapat mendeteksi tingkat kesuburan wanita berdasarkan ukuran sel telur.

Kesuburan wanita ditentukan dari kualitas sel telurnya. Normalnya, ukuran sel telur yang siap untuk berovulasi (pecah dan dibuahi) adalah sekitar 18-24 mm.

Selain USG, saat ini sudah terdapat alat yang dapat mengukur tingkat kesuburan wanita berdasarkan masa ovulasi mereka melalui alat yang kurang lebih sama dengan test pack kehamilan. Dengan begitu, wanita akan lebih mudah untuk mengetahui kapan mereka berovulasi, sehingga memudahkan bagi mereka yang sedang berusaha untuk hamil.



Redaksi menerima pertanyaan pembaca melalui email mediacenter@bkkbn.go.id atau melalui Call Center 0812 3888 8840, Media Center BKKBN



Memassifkan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting

■ Oleh: Sukaryo Teguh Santoso*

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menggerakkan program Bapak Asuh Anak Stunting. Gerakan secara massif itu dilakukan karena saat ini terdapat 13,5 juta keluarga berisiko *stunting* di Indonesia.

Gerakan ini telah direspon secara positif oleh kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan bahkan perorangan untuk menjadi Bapak Asuh atau Kakak Asuh.

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia tahun 2022 terdapat 13.511.649 keluarga berisiko *stunting*. Jumlah ini merupakan bagian dari 71.334.664 total jumlah seluruh keluarga di Indonesia.

Di dalam keluarga berisiko *stunting* itu juga termasuk di dalamnya adalah keluarga yang miskin ekstrem. Jumlahnya 6,8 juta keluarga. Sedangkan jumlah keluarga miskin dan rentan di Indonesia mencapai 29,7 juta keluarga.

Karena itu, gerakan Bapak Asuh Anak Stunting tidak hanya menyasar anak-anak *stunting* namun juga untuk mengentaskan keluarga miskin ekstrem.

Ada empat prioritas program bantuan pemerintah terhadap keluarga berisiko *stunting*. Prioritas pertama, keluarga berisiko *stunting* dengan peringkat kesejahteraan I, yang berjumlah 2.417.028 keluarga.

Prioritas kedua, bagi keluarga berisiko *stunting* dengan peringkat kesejahteraan II, yang jumlahnya 2.016.598 keluarga. Prioritas ketiga, sasarannya untuk 1.738.336 keluarga, dan prioritas keempat dengan jumlah sasaran 1.501.579 keluarga.

Bapak Asuh Anak *Stunting* merupakan program gotong royong untuk membantu anak-anak *stunting*. Agar memiliki daya ungkit, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrachman telah ditetapkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting. Penetapan itu berlangsung pada Peringatan Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini ribuan anak-anak *stunting* di Indonesia telah mendapat bantuan dari para Bapak Asuh Anak *Stunting*. Bantuan itu berupa telur dan bahan pangan protein hewani lain seperti ikan lele.



Bantuan bisa berupa uang Rp15 ribu per hari yang akan dikelola oleh Tim Pendamping Keluarga. BKKBN sendiri telah menyiapkan 200 ribu Tim Pendamping Keluarga atau sebanyak 600 ribu orang yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Mereka tersebar di seluruh Indonesia.

BKKBN secara institusi juga telah melakukan gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*. Saat ini ada 431 pegawai di lingkungan BKKBN pusat yang telah menjadi Bapak Asuh Anak Stunting bagi 423 sasaran anak *stunting*.

Bantuan Bapak Asuh Anak *Stunting* di lingkungan kantor BKKBN pusat ini disalurkan di empat provinsi yakni Kabupaten Lebak, Banten; Jakarta Timur, DKI Jakarta; Kabupaten Sumedang di Jawa Barat; dan Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah.

Kini gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* semakin meluas. Ribuan orang tertarik dan bergerak di dalamnya. Salah satunya tergambar melalui gerakan bag-bagi telur yang dilakukan para Bapak Asuh Anak *Stunting*.

Gerakan massif ini diharapkan dapat memutuskan mata rantai masalah *stunting* di Indonesia yang menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensinya bertengger di angka 21,6 persen.

Target 14 persen *stunting* pada 2024 diyakini tercapai manakala Bapak Asuh Anak *Stunting* benar-benar bergerak massif memerangi *stunting*. Sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 akan terealisasi.

Bila semua berjalan *on the track*, tak usah lagi bertanya atau bahkan mempersoalkan lagi kualitas SDM Indonesia. Indonesia maju, Indonesia Emas sudah berada sekedipan mata.

* Penulis adalah
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakkan,
dan Informasi BKKBN



MERDEKAKAN ANAK INDONESIA DARI STUNTING



Sahabat Keluarga
Edisi Agustus 2023

bkkbn.go.id

 @BKKBNofficial

BERENCANA ITU KEREN